

Sinergi

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Buletin BPIW

KEMENTERIAN PUPR
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



***“Smart Planning”* Solusi Pengembangan
Kawasan Perkotaan**

Upaya Mewujudkan *Smart City* di Indonesia



Edisi 03/Maret 2016



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbpiw@gmail.com

Telp. +6221-7279 8112

 www.bpiw.pu.go.id

 [@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)

 [Layanan Informasi BPIW](#)

Sinergi

Buletin BPIW

Pelindung:

A. Hermanto Dardak

Penasehat:

Dadang Rukmana

Pengarah:

Hadi Sucahyono
Harris H. Batubara
Rezeki Peranginangin
Kuswardono

Pemimpin Redaksi:

P. Yudantoro

Redaktur Pelaksana:

Shovich

Redaksi:

Etty Winarni
M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :

Hendra Djamal
Aji Noor Muhammad
Hajar

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Andina Dwiky
Ichlasul Naufal
Nina Indahsari
Dian Rosnawati

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: @informasiBPIW
Youtube: Layanan informasi BPIW
No. Telp. +6221-7279 8112

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito

SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan Maret ini kita akan memfokuskan pada pembahasan seputar perkotaan. Dalam Kabar Utama akan dibahas mengenai program pengembangan kawasan perkotaan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Selain itu, pada Kabar Utama juga dibahas mengenai tantangan pembangunan perkotaan, dimana urbanisasi berkembang dengan cepat.

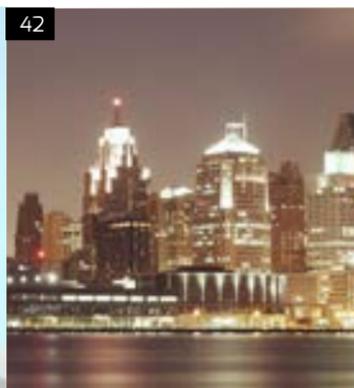
Untuk laporan khusus juga dibahas seputar perkotaan, yakni menyangkut konsep *smart city*, mulai dari pengertian *smart city* atau kota cerdas hingga program *smart city* yang akan diterapkan di Indonesia. Dalam rubrik Wawancara menampilkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Ir. Kuswardono, MCP, menjelaskan banyak hal mengenai program-program terkait pengembangan kawasan perkotaan.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan Maret, melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan pantai Kenjeren di Surabaya. Kemudian dalam rubrik Tips dibahas mengenai trik-trik dalam menghadapi kemacetan dan rubrik *Glossary* menampilkan beberapa istilah Kota. Kita berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.

daftar isi

Edisi 03/Maret 2016



03 SALAM REDAKSI

04 DAFTAR ISI

05 PERSPEKTIF

Memantapkan Pengembangan Kawasan Perkotaan

06 KABAR UTAMA

"Smart Planning"
Solusi Pengembangan Kawasan Perkotaan

10 GLOSSARY

Berbagai Definisi Tentang Kota

10 REVIEW

Membangun Kembali, Kota yang Seimbang Dengan Alam

14 WAWANCARA

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
Ir. Kuswardono, MCP

18 TEROPONG MEDIA

Kementerian PUPR Dalam Media Cetak

20 TOKOH

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc
Pentingnya Peran BPIW,
Dalam Memantapkan Program Infrastruktur

22 KILAS BPIW

Harmonisasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Dibutuhkan dalam Pembangunan Daerah di Indonesia

44 LAPORAN KHUSUS

Upaya Mewujudkan Smart City di Indonesia

48 OPINI

Mengupas Keberadaan Kawasan Metropolitan

52 JALAN-JALAN

Pesona Pantai Ria Kenjeran Surabaya

56 INFOGRAFIS

Dukungan terhadap Pembangunan 15 Bandara Udara

58 TEKNOLOGI

Bandung Command Center,
Langkah Menuju Smart City

60 POTRET

Dinamika Kawasan Perkotaan

61 INFO PRODUK BPIW

Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung

64 TIPS

Tips Hadapi Kemacetan

Memantapkan Pengembangan Kawasan Perkotaan



Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019 disebutkan bahwa Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan adalah memperkuat keterkaitan kota dan desa serta membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal, melalui tiga hal, pertama, Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN).

Kedua, pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk kelompok lansia, disabel, wanita, anak, melalui perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, perwujudan green city atau kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, dan pengembangan Kota Cerdas dan daya saing kota. Ketiga, peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Dengan demikian Renstra Kementerian PUPR tersebut mengamanatkan bahwa pengembangan Kawasan Perkotaan diarahkan pada konsep *green city*. Dari sisi pengertiannya, *green city* adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan sehingga kota menjadi tempat yang layak huni tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga generasi yang akan datang.

Sebanyak 112 kota di Indonesia saat ini ditata menjadi *green city*. Namun dari 112 kota tersebut, ada delapan kota yang diprioritaskan menjadi *smart city*. Kedelapan kota itu adalah Bandung, Metro Lampung, Yogyakarta, Semarang, Singkawang, Mataram, Jombang, dan Probolinggo. Dua nama terakhir yakni Jombang dan Probolinggo merupakan kabupaten yang dijadikan *green city*.

Dalam program *green city* didalamnya ada delapan komponen utama. Kedelapan komponen *green city* adalah, pertama, smart community atau masyarakat yang cerdas. Hal ini merupakan komponen utama untuk nantinya terjadinya perubahan *green city* menjadi *smart city*. Komponen kedua, smart planning and design atau perencanaan dan disain, dimana pengembangan perkotaan

menggunakan dan teknologi terkini. Komponen ketiga, smart transportation atau transportasi yang cerdas. Komponen keempat, yakni menerapkan smart water management atau manajemen air yang pintar. Dengan diterapkannya komponen ini, maka demi kepentingan masyarakat perkotaan, air bisa dikelola, baik air baku maupun air bersih.

Kelima, penerapan konsep *smart waste management* atau manajemen pengelolaan sampah. Jadi mengelola sampah dengan cerdas, sehingga sampah tidak sekedar dipilah, tapi bagaimana mengolah sampah menjadi bernilai ekonomi sehingga dapat membantu masyarakat kota.

Keenam, *smart green building* atau embuat gedung-gedung dengan tanaman, sehingga menjadi hijau. Komponen yang ketujuh adalah, *smart green open space* atau ruang terbuka hijau atau RTH. Untuk RTH ini harus mencapai 30% dari total luas dari suatu daerah. Hal ini penting agar masyarakat kota dapat tetap menghirup udara yang segar.

Kedelapan, smart energy, dimana masyarakat di sebuah kota harus bisa memanfaatkan energi ini, misalnya energi panas matahari dapat disimpan dan dipergunakan sebagai pengganti listrik.

Konsep *green city* ini penting, disamping juga permasalahan di perkotaan juga perlu diatasi, seperti masalah kawasan kumuh. Dengan konsep pengembangan kota yang asri dan ramah lingkungan, maka diharapkan kawasan kumuh tidak ada lagi di perkotaan, sebagaimana target RPJMN 2015-2019.

Namun tak kalah penting juga adalah peningkatan keterkaitan antara desa dan kota desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa.

“Smart Planning” Solusi Pengembangan Kawasan Perkotaan

Indonesia menghadapi tantangan pembangunan perkotaan dimana urbanisasi berkembang dengan begitu cepat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 49,8%. Angka ini meningkat pada tahun 2015 menjadi 53,3%. Prosentase penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan akan meningkat menjadi 56,7% pada tahun 2020. Ini berarti dalam kurun waktu selama 5 tahun yakni 2015 hingga 2020, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan persentasenya meningkat menjadi 3,4%.



Ilustrasi kota Metropolitan

Sumber: Istimewa

Persoalan urbanisasi ini dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, pertumbuhan penduduk secara alami yakni kelahiran. Kedua, migrasi dari desa dan kota. Ketiga, berubahnya kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan.

Kota sebagai tempat mencari penghidupan yang lebih layak dianggap sebagai faktor penentu tingginya orang tertarik untuk tinggal dan bekerja di sana. Tantangan yang dihadapi dengan semakin banyak orang yang

tinggal di kota akan meningkatkan kebutuhan perumahan, infrastruktur dasar, dan fasilitas perkotaan. Namun, untuk mendapatkan tempat tinggal di kota yang terjangkau ternyata cukup sulit, sehingga lahirnya kawasan kumuh perkotaan dan sektor informal. Hal ini juga diperburuk dengan sulitnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit dan mempengaruhi kesehatan warga. Selain itu, kota menghadapi tantangan lingkungan, dimana kota berkontribusi pada 70% gas rumah kaca akibat polusi udara sebagai penyebab utama perubahan iklim.

Kota juga menjadi wilayah yang paling rentan terhadap ancaman bencana atas kehilangan nyawa, harta benda, aset infrastruktur dan properti. Secara bersamaan, pertumbuhan fisik kota yang cepat dan tidak terkendali ditunjukkan dengan berkembangnya kawasan perumahan di pinggir kota atau urban sprawl, sementara tempat bekerja dan kawasan perdagangan yang berada di pusat kota yang menyebabkan kota semakin lebar, sehingga membutuhkan perjalanan yang lebih jauh utamanya menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Kota menjadi tidak ramah, tidak efisien, dan kurang produktif.

Berbagai persoalan perkotaan tersebut serta urbanisasi yang bersifat menuntut kebutuhan memerlukan solusi yang tepat. Kebijakan perkotaan harus sejalan dengan tujuan ke-11 dari *Sustainable Development Goals* yakni “menciptakan kota yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan”. Pemenuhan kebutuhan dasar warga kota, termasuk infrastruktur dasar menjadi salah satu prioritas selain juga mengembangkan ekonomi kota secara lebih luas. Kota perlu dikembangkan lebih humanis melalui perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kota secara cerdas. Perencanaan kota yang cerdas atau smart planning berarti merencanakan kota baik dari sisi eksternal seperti konektivitas antarkota, hubungan antara kota dan desa, penyediaan air baku, maupun sisi internal yang lebih memberikan pelayanan kepada warga kotanya maupun terkait penataan kawasan. Smart disini berarti melakukan perencanaan pembangunan kota yang lebih inovatif.

Smart planning harus memiliki tujuan pembangunan kota yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup warganya, termasuk keamanan, kesejahteraan, dan kesehatan. Untuk mencapainya, proses pembangunan kota harus holistik dan menggunakan pendekatan yang inklusif, sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak orang, dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua. Pembangunan kota harus berprinsip pada pertumbuhan yang cerdas atau *smart growth*. Kota harus memiliki sistem jaringan jalan yang efisien, aksesibel, dan terkoneksi antar kawasan dengan baik. Penggunaan lahan dilakukan dengan bijak dan untuk berbagai kepentingan.

Penyediaan berbagai tipe perumahan ditujukan bagi seluruh kalangan termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Insentif yang tepat juga perlu dikembangkan untuk pengembangan ekonomi kota yang akan meningkatkan 15% jumlah lapangan kerja. Perbaikan permukiman kumuh juga perlu dilaksanakan dengan menyediakan mobilitas dan fasilitas umum yang memadai. Akses universal ke layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan persampahan multilak disediakan. Penyediaan lahan untuk ruang publik disediakan, setidaknya 30% di luas kota. Lahan untuk publik ini sebagai tempat untuk berinteraksi sosial, berolahraga, dan aktivitas kebudayaan.

Selain itu, transportasi publik yang terjangkau juga disediakan, termasuk bagi

Rencana Pembangunan Fisik Terpadu yang Cerdas (Smart Development Planning)

Pembangunan Infrastruktur Terpadu secara cerdas untuk pengembangan wilayah dan kawasan di Sumatera Bagian Selatan
(Corridor Development)



pejalan kaki dan pesepeda. Kota juga harus lebih ramah lingkungan untuk mengatasi dampak perubahan iklim, menyediakan lingkungan yang bersih, energi yang ramah lingkungan dan pada saat yang sama kota, perlu ketahanan terhadap bencana.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,

an nasional, percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, pengembangan kota cerdas dan berdaya saing berbasis teknologi dan budaya lokal, serta peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Terkait dengan Kementerian PUPR, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menilai perlu dilakukan percepatan pembangunan kawasan perkotaan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. “Percepatan pembangunan perkotaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Menata kota merupakan refleksi mozaik atau refleksi seni dari pembangunan infrastruktur yang semestinya dapat mengatasi pertumbuhan penduduk di perkotaan,” ujar Dardak beberapa waktu lalu.

Sesuai tugas dan wewenang Kementerian PUPR, pembangunan kota agar terus berkembang, dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan sebagai pusat pertumbuhan wilayah. BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menyusun rencana pembangunan infrastruktur PUPR dalam bentuk development plan. Pendekatan pembangunan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 49,8%. Angka ini meningkat pada tahun 2015 menjadi 53,3%.

pembangunan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan sudah sejalan dengan prinsip pembangunan cerdas yang diarahkan untuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal. Hal ini dilakukan dengan perwujudan sistem perkota-

Pengelolaan Air secara Cerdas

(Smart Water Body Management)

Pemanfaatan KBT sebagai Showcase Koridor Infrastruktur Hijau



infrastruktur dilakukan melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana kota menjadi salah satu unsur pembentuk pengembangan wilayah bersamaan dengan kawasan strategis seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan pelabuhan dengan infrastruktur sebagai penghubung dan pengikatnya.

Pengembangan kawasan perkotaan juga tetap memperhatikan keterkaitan antara kota dan desa sebagai bagian dari sistem produksi dan konsumsi sumberdaya. Development plan ini tidak lain adalah upaya dari perwujudan rencana tata ruang dengan menyiapkan program pembangunan kota yang mengindikasikan lokasi, besaran/volume, tahapan/waktu, dan biaya pelaksanaannya. Selain development plan, inkubasi penataan kota dan penyusunan pedoman-pedoman perkotaan juga tengah disiapkan.

Dengan development plan ini, perencanaan dan pembangunan infrastruktur bidang PUPR pada kawasan perkotaan utamanya sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat, dengan tetap terpadu dengan kewenangan pemerintah daerah dan swasta. Kementerian PUPR memiliki portofolio pem-

angunan infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan perumahan rakyat. Infrastruktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas antarkota

“Percepatan pembangunan perkotaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Menata kota merupakan refleksi mozaik atau refleksi seni dari pembangunan infrastruktur yang semestinya dapat mengatasi pertumbuhan penduduk di perkotaan,” ujar Dardak.

dan antarkawasan di kota seperti pembangunan dan peningkatan jalan antarkota, pembangunan jalan lingkar kota, mengurangi kemacetan pada beberapa persimpangan melalui pembangunan flyover atau underpass. Infrastruktur sumber daya air lebih dititikberatkan pada penyediaan air baku

Pengendalian banjir
Konservasi air
Koridor RTH
Transportasi air dan dermaga
Pariwisata
Kawasan perniagaan
pelabuhan



Early warning system untuk peringatan banjir



untuk perkotaan dan pengendalian banjir. Infrastruktur permukiman dibangun untuk menyediakan akses universal layanan prasarana dasar yakni air bersih, sanitasi, persampahan, penanganan permukiman kumuh dan revitalisasi kawasan. Penyediaan perumahan ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti pembangunan rumah susun.

Selain aspek fisik infrastruktur, pengembangan kota di Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial-budaya dan aspek teknologi. Aspek lingkungan menekankan prinsip-prinsip green city yaitu kota yang ramah lingkungan dengan menggunakan sumber daya air dan energi yang efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alam dengan kawasan yang akan dibangun. Selanjutnya, aspek sosial budaya menekankan prinsip-prinsip heritage city, yaitu kota yang menjaga dan melestarikan aset-aset pusaka sebagai bagian integral pengembangan ekonomi kota. Berikutnya, aspek teknologi, yang menekankan prinsip-prinsip smart city, di-

mana penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan kota yang menjamin kecepatan, kemudahan, dan akuntabilitas, baik layanan publik maupun prasarana dan sarana perkotaan bagi masyarakat kota.

Untuk mewujudkannya development plan, pengembangan kota harus memenuhi tiga syarat utama. Pertama, perencanaan harus visioner sesuai dengan potensi pengembangan kota. Kebijakan pengembangan kota yang ditetapkan seperti dalam RTRW atau RPJMN menjadi pijakan dasar dalam menyiapkan program pembangunannya, termasuk untuk bidang PUPR.

Kedua, institusi pelaksana pengembangan kota harus kuat yang memerlukan sinergi dalam mewujudkan rencana tersebut agar kontrol terhadap pembangunan kota tetap terjaga. Peran pemerintah kota lebih signifikan dan harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta. Namun demikian, peran pihak swasta tidak boleh terlalu dominan, dan harus tetap ada kehadiran negara, peran dan kendali pemerintah melalui kebijakan dan regulasi. Hal sejalan dengan prinsip pembangunan kota untuk semua, dimana kota tidak hanya kalangan menengah keatas saja tapi juga menengah kebawah.

Ketiga, kota itu harus sudah punya strategi penataan kota yang baik untuk mencapai target-target kinerja pembangunan atau key performance indicators (KPI) seperti rasio jalan terhadap luas wilayah kota mencapai 20%, Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus mencapai 30%, lingkungan permukimannya sehat, dan ketersediaan air yang cukup. Keempat indikator tersebut merupakan portofolio bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kementerian PUPR sangat concern un-

tuk membangun kota di Indonesia melalui perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR yang disusun BPIW. Hal ini mengingat sektor lain seperti perhubungan, perindustrian, dan pariwisata, tidak membangun kota secara utuh, namun membangun sesuai sektornya masing-masing. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Ir. Kuswardono, MCP, mengatakan bahwa fokus pada tahun 2016 ini adalah

“Tahun 2015 kita masih banyak melakukan kajian, seperti kajian indeks mobilitas perkotaan dan indeks kesehatan, dan tahun ini kita berupaya agar development plan dari kota-kota yang menjadi sasaran RPJMN dapat terpenuhi,” ungkap Kuswardono.

mengejar output pengembangan kawasan perkotaan dan juga menyusun development plan untuk kota-kota yang sudah menjadi target untuk dikembangkan, terutama yang tertuang di RPJMN 2015-2019. “Tahun 2015 kita masih banyak melakukan kajian, seperti kajian indeks mobilitas perkotaan dan indeks kesehatan, dan tahun ini kita berupaya agar development plan dari kota-kota yang menjadi sasaran RPJMN dapat terpenuhi,” ungkap Kuswardono.

Development plan yang disiapkan BPIW adalah untuk kota-kota di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Kota-kota tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yakni tujuh kawasan metropolitan yang ada, lima kawasan perkotaan besar yang akan menjadi metropolitan baru, 10 kota baru, 20 kota sedang, dan 39 kawasan pusat pertumbuhan baru terkait

hubungan kawasan perdesaan dengan kota kecil. Kota-kota tersebut merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Beberapa development plan yang disiapkan antara lain kawasan metropolitan seperti Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, Tanah Karo), Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Cekungan Bandung, Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi), Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Sarbagita (Denpasar, Gianyar, Tabanan), Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar), Palembang Raya, Manado-Bitung, Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura, Yogyakarta, Pekanbaru, Cirebon, Cilacap, Pontianak, dan Bandar Lampung.

Development plan juga dibuat untuk kota baru seperti Sei Mangkei di Sumatera Utara, Tanjung Selor di Kalimantan Utara, Maja di Banten, Bandar Kayangan di Lombok, dan Sofifi di Maluku Utara. Inkubasi kawasan perkotaan juga diinisiasi untuk EcoDistrict di sembilan kota, Kota Cerdas di lima kota, Kota Berketahanan di empat kota, Anjungan Cerdas Suramadu, dan Koridor Hijau Kanal Banjir Barat (KBT) Jakarta. Sementara itu, pedoman perkotaan yang diusulkan antara lain urban redevelopment, ruang bawah tanah, indeks mobilitas perkotaan, indeks kesehatan dan kebahagiaan, serta indeks infrastruktur keberlanjutan perkotaan. **Tim redaksi**



Konsep kawasan perkantoran kota

Sumber: Istimewa

Berbagai Definisi Tentang Kota

Kota adalah pusat kehidupan yang dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang pendekatan. Aspek tersebut memberikan gambaran bahwa kota menjadi tempat manusia atau masyarakat berperilaku mengisi aktifitas kehidupannya sehari-hari. Akhir-akhir ini banyak berkembang berbagai istilah kota di masyarakat yang kurang dipahami. Istilah kota di bawah ini akan kami urai satu demi satu.



Sudut kota metropolitan

Sumber: Istimewa



Ilustrasi perkotaan

Sumber: Istimewa

Kota

Daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian; cenderung berpola hubungan rasional, ekonomi, dan individualistik

Kota Baru

Kota yang dibangun dari nol hingga siap huni, lokasinya dapat di bagian dari kota lama atau di luarnya

Kota Baru Penunjang

Kota baru yang mendukung kota induknya; kota baru memang dikembangkan dalam kaitannya dengan perkembangan suatu kota besar sebagai kota induknya (supporting new town)

Kota Berkelanjutan

Kota yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang sebagai suatu interaksi antara sistem biologis dan sumber daya, dengan sistem ekonomi dan sistem sosial (sustainable city)

Kota Besar

Kota dengan jumlah penduduk antara 500.001 jiwa hingga 1.000.000 jiwa

Kota Ekologi

Kota dengan keseimbangan antara pembangunan, perkembangan kota, dan kelestarian lingkungan; pengertian lebih luas ialah adanya hubungan timbal balik antara kehidupan kota dan lingkungannya

Kota Global

Kota-kota yang memiliki hubungan erat secara global, seperti kota metropolitan

Kota Inti

Kota yang menjadi pusat kegiatan nasional kawasan perkotaan yang dikelilingi oleh kota-kota satelit

Kota Kecil

Permukiman dengan jumlah penduduk antara 20.000 jiwa hingga 100.000 jiwa

Kota Mandiri

Pusat-pusat permukiman baru yang dikembangkan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kegiatan masyarakat di kota besar yang sudah padat, meningkatkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menerpadukan pemanfaatan ruang di sekitarnya, dan meningkatkan fungsi ruang yang lebih seimbang (self contained town)

Kota Memanjang

Kota yang dirancang atas prinsip bahwa rute transportasi harus menjadi determinan atau penentu mengenai bentuk kota, pembangunannya diatur pada kedua sisi poros atau jalan utamana (linear city)

Kota Mendatar

Kota yang berkembang meluas secara horizontal

Kota Metropolitan

Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa; sering disebut juga kota metropolitan

Kota Pariwisata

Permukiman yang dibangun, terutama untuk rekreasi, termasuk kegiatan yang bersifat fisik, mental dan budaya, umumnya terdapat fasilitas hotel, motel, rumah makan, dan toko cendera mata.

Kota Pelayanan

Kota dengan fungsi utama menyediakan berbagai jenis jasa atau kota yang kehidupan ekonominya terutama ditunjang oleh kegiatan sektor jasa; sektor jasa dapat berupa perhotelan, perdagangan, restoran, perseorangan, transportasi, hiburan, lembaga keuangan, dan pemerintahan

Kota Sedang

Kota dengan jumlah penduduk antara 100.001 jiwa hingga 500.000 jiwa

Kota Taman

1. Kota yang dirancang untuk memperbaiki mutu kehidupan kota industri yang dirasakan makin memburuk, dalam besaran yang memungkinkan kehidupan sosial yang utuh, dikelilingi oleh jalur daerah pertanian
2. Kota yang di dalamnya mengandung jalur dan kantong-kantong fasilitas pekarangan hijau; selain itu, kota tetap menyediakan fasilitas lengkap untuk kehidupan sosial beserta kemudahan-kemudahan lain

Kota Tani

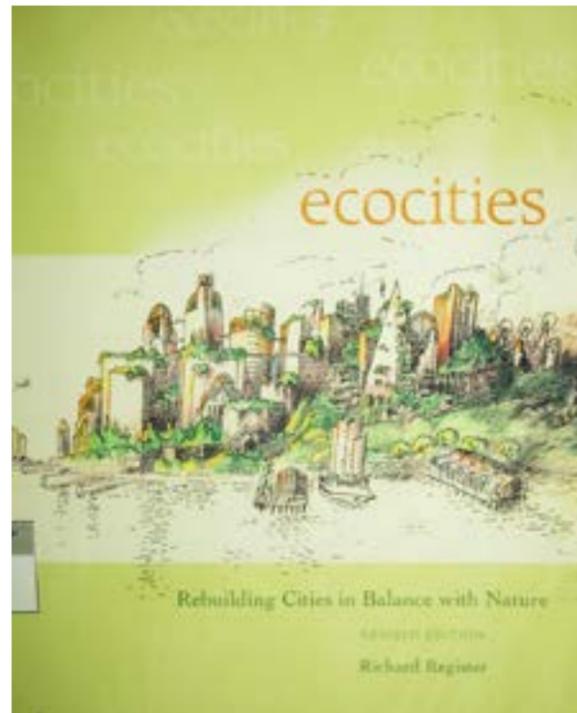
Kota pusat pengumpul hasil pertanian, kegiatan ekonominya berdasarkan perdagangan hasil pertanian

Kota Terpadu Mandiri

Kawasan transmigrasi, pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Sumber:

Buku Kamus Penataan Ruang, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum tahun 2009.



Membangun Kembali, Kota yang Seimbang Dengan Alam

Judul *Ecocities* : *Rebuilding Cities in Balance with Nature (Revised Edition)*
 Penulis : Richard Register
 Penerbit : Gabriola, B.C. : New Society Publishers
 Tahun terbit : 2006

Buku *Ecocity* berbicara tentang membangun ulang kota besar dan kota kecil berdasarkan prinsip ekologi untuk keberlanjutan jangka panjang, vitalitas budaya, dan kesehatan biosfer bumi.

Sebagian besar populasi dunia sekarang tinggal di kota. Jadi jika kita ingin mengatasi masalah kerusakan lingkungan dan teori puncak produksi minyak, maka kota yang harus menjadi perhatian dan fokus utama.

Buku *Ecocity* berbicara tentang membangun ulang kota besar dan kota kecil berdasarkan prinsip ekologi untuk keberlanjutan jangka panjang, vitalitas budaya, dan kesehatan biosfer bumi. Di dalam buku ini kita dapat menemukan wawasan bahwa pembentukan kota sangatlah penting. Sebenarnya kita mampu untuk merubah pembentukan kota, dan hal ini penting untuk kita lakukan.

Buku ini juga menggambarkan evolusi situs-situs, gejala alam, dan sejarah dalam sebuah kota. Hal ini membutuhkan perhatian khusus untuk beberapa pertanyaan penting, yaitu: aksesibilitas dan transportasi, dan menguraikan prinsip-prinsip desain untuk *ecocity* tersebut. Pembaca didorong untuk terjun ke bidang ekonomi dan politik: jenis usaha, perencanaan dan kepemimpinan yang diperlukan. Buku ini kemudian menguraikan alat transisi bertahap untuk *ecocity* yang bisa dicapai. Dalam edisi baru ini digambarkan dengan jelas melalui inspirasi visi

penulis tentang seperti apa kota bentuk yang dibangun kembali.

Sang penulis, Richard Register, adalah salah satu teoritis besar dunia dan penulis mengenai perencanaan dan desain kota ekologis. Ia juga pendiri Ekologi Perkotaan dan *Ecocity Builders*. Ia mengadakan *International Ecocity Conference* pertama pada tahun 1990, mengajar di beberapa negara, dan telah menulis dua buku sebelumnya, serta *ecocities* edisi sebelumnya.

Buku ini memberi anda wawasan dan ide baru mengenai perkotaan. Sebuah karya yang cukup baik bagi kita yang ingin mengetahui bagaimana kita bisa mentransformasi kota menjadi suatu tempat yang bukan hanya sustainable, tapi juga yang menyenangkan, inspiratif, dan nyaman untuk hidup. Gambar-gambar juga disajikan dengan baik dan menggambarkan konsep yang menarik untuk arsitektur dan desain kota. Mungkin beberapa saran di dalam buku ini terlalu ekstrim, tapi itu adalah cara kita untuk mulai berpikir tentang perencanaan masyarakat dan keberlanjutan masyarakat.

Namun, di dalam buku ini penulis tidak mencoba untuk menyajikan langkah-langkah yang lebih konkret untuk perubahan perkotaan. Jika anda bukan tipe orang yang abstrak, anda lebih baik skip bagian ini. Karena langkah-langkah yang disajikan terlalu tinggi dan penuh jargon melodramatis tentang penurunan kondisi sosial dan munculnya krisis ekologi dan bahwa hal itu sudah terlambat, sedangkan satu-satunya

Sang penulis, Richard Register, adalah salah satu teoritis besar dunia dan penulis mengenai perencanaan dan desain kota ekologis. Ia juga pendiri Ekologi Perkotaan dan *Ecocity Builders*. Ia mengadakan *International Ecocity Conference* pertama pada tahun 1990

hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyatakan keadaan darurat ekologi nasional. Ide yang indah tetapi tidak mengakomodir rencana aksi yang realistis untuk meningkatkan ketahanan kota.

Sebagai gambaran lebih lanjut, buku ini terdiri atas 12 chapter, yaitu:

- Chapter 1: *As We Build, So Shall We Live*
- Chapter 2: *The City in Evolution*
- Chapter 3: *The City in Nature*
- Chapter 4: *The City in History*
- Chapter 5: *The City Today*
- Chapter 6: *Access and Transportation*
- Chapter 7: *What To Build*
- Chapter 8: *Plung on in!*
- Chapter 9: *Personal Odyssey*
- Chapter 10: *Tools to Fit the Task*
- Chapter 11: *What the Fast-Breaking News May Mean*
- Chapter 12: *Toward Strategies For Success*



BPIW Fokus pada Program Pengembangan 32 kota di Indonesia

Ir. Kuswardono, MCP

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR

Keberadaan sebuah kota harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, seperti infrastruktur perkotaan yang handal, tempat tinggal yang layak, tempat bisnis, perkantoran, rekreasi, dan ruang terbuka hijau (RTH), serta kebutuhan lainnya. Selain itu, kota juga harus tumbuh dan berkembang, sehingga penataan kota tidak lagi tanpa arah, tapi terstruktur dengan baik. Untuk mewujudkan itu semua, dibutuhkan program perencanaan pembangunan atau development plan yang matang.

Saat ini Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan tengah fokus pada pengembangan 32 kota. Mengapa 32 kota itu perlu dikembangkan?, dan seperti apa konsep pengembangannya?. Sehubungan dengan hal itu, beberapa waktu lalu, Tim Sinergi sempat mewawancarai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR Ir. Kuswardono, MCP. Berikut petikan wawancaranya.

Seperti apa tantangan pengembangan kota di Indonesia saat ini?

Pengembangan kota itu harus ada tiga syarat utama. Pertama, perencanaan harus baik. Perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang punya visi yang bisa diwujudkan dalam pembangunannya. Visinya boleh bagus tapi kalau programnya tidak mengarah pada visinya, jadi persoalan. Ini yang menjadi tantangan di Indonesia. Misalnya, bila ditargetkan *one village one product*, maka ketika sudah dipilih desa yang diprioritaskan untuk dikembangkan, maka perlu dicari produk unggulan yang perlu didukung. Untuk infratraktur bidang PUPR, BPIW mengarah pada hal itu. Sebagai contoh, kalau di suatu kawasan sudah ditetapkan pelabuhan internasional, maka dari sisi PUPR, dukungan infrastruktur yang seperti apa yang bisa dilakukan. Demikian pula terkait pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang diprioritaskan, kita telah siapkan program untuk mendukung itu dan kita juga telah menjalin kerjasama dengan World Bank. Jadi yang pertama, rencana harus baik. Kemudian yang kedua, institusinya harus kuat. Hal ini penting, agar ada kontrol pembangunan. Sebetulnya instrumen untuk mengontrol pembangunan sudah ada tapi belum dilakukan secara maksimal. Ketiga, kota itu harus sudah punya strategi penataan kota yang baik.

Contohnya bila di Kota Malang Ruang Terbuka Hijau atau RTH baru mencapai 7%, apa yang harus dilakukan?. Jadi strategi kita buat untuk mencapai target RTH yakni 30%.

Selain itu juga harus memenuhi empat *Key Performance Indicators* atau KPI. Pertama, rasio jalan terhadap luas wilayah kota mencapai 20%. Kedua, RTH harus mencapai 30%. Ketiga, lingkungan permukimannya sehat. Keempat, ketersediaan airnya cukup. Air ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya cadangan air di Indonesia hanya sekitar 400 meter kubik per tahun per kapita.

Hal ini berbeda dengan negara lain yang memiliki cadangan air yang lebih banyak, seperti di Jepang cadangan airnya mencapai 4.000 meter kubik per tahun per kapita, Amerika sudah mencapai 7.000 meter kubik per tahun per kapita, Thailand mencapai 3.000 meter kubik per tahun per kapita, dan Singapura sekitar 2.000 meter kubik per tahun per kapita.

Kalau empat KPI itu belum tercapai, seperti apa strategi yang kita

lakukan, itu yang harus kita pikirkan. Kalau dalam melakukan penataan kota, perlu ada perubahan tata ruang, maka kita dapat usulkan perubahan tersebut.

Apa fokus utama program pengembangan kawasan perkotaan tahun ini?

Fokus kita pada tahun ini adalah mengejar output dari pengembangan kawasan perkotaan dan juga menyusun development plan untuk kota-kota yang sudah menjadi target untuk dikembangkan, terutama yang tertuang di RPJMN 2015-2019 untuk Kementerian PUPR. Langkah yang kita lakukan ini merupakan tindak lanjut dari tahun lalu, karena tahun 2015 kita masih banyak melakukan kajian, seperti kajian indeks, yang sifatnya bukan development plan. Dengan berpijak pada tugas dan fungsi pokok BPIW, tahun ini kami berupaya agar terwujudnya development plan di beberapa kota yang menjadi sasaran RPJMN.

Seperti apa bentuk dari development plan tersebut?

Sebetulnya development plan itu intinya adalah *infrastructure planning* sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan *development plan* ini kita mendorong pusat-pusat pertumbuhan wilayah agar

terus berkembang. Saat ini pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, yaitu pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Jadi dengan WPS itu, baik kota maupun desa menjadi kawasan pertumbuhan bagi beberapa sektor seperti pariwisata maupun industri. Kita harus mendorong pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan tersebut. Kita sekarang fokus pada program pengembangan 32 kota di Indonesia, seperti Bandar Lampung, Cilacap, Malang, dan Cirebon. Kemudian untuk kota Metropolitan yang dikembangkan seperti Palembang, Manado, dan Bitung.

Bagaimana memilih 32 kota itu untuk dikembangkan?

Kota-kota yang kita fokuskan pengembangannya ini, sebenarnya merupakan lanjutan dari kajian yang kita lakukan tahun lalu. Jadi kita pilih kota-kota itu berdasarkan kajian yang kita lakukan. Selain itu, berdasarkan RPJMN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah menyurati kita agar beberapa kota itu diprioritaskan



Fokus kita pada tahun ini adalah mengejar *output* dari pengembangan kawasan perkotaan dan juga menyusun *development plan* untuk beberapa kota yang sudah menjadi target untuk dikembangkan, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN Kementerian PUPR.

menjaga agar pembangunan kota dapat konsisten?

Sebenarnya kuncinya, setelah *planning* dibuat, pemerintah kota yang harus lebih aktif, karena untuk membangun kota harus dimobilisasi dari berbagai cara, sehingga tidak mengandalkan pemerintah saja, tapi swasta juga dapat ikut membangun kota, akan tetapi pihak swasta tidak boleh mendominasi. Misalnya kalau sebuah kota untuk orang kaya saja, masyarakat miskin tinggal di mana?. Jadi, walaupun pendanaannya 70% dari swasta, tapi mereka tidak bisa serta merta mengatur pembangunan perkotaan. Harus pemerintah kota yang mengatur hal itu. Membangun kawasan perkotaan yang baru, harus mempunyai *smart planning* yang memperhatikan segala hal, seperti masalah aksesibilitas. Selain itu kawasan perkotaan juga memperhatikan masalah ekonomi dan sosial.

mekanisme Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg. Setelah Pra Konreg ada koordinasi sebelum digelar nya Konsultasi Regional atau

setelah *planning* dibuat, pemerintah kota yang harus lebih aktif. Membangun kota harus dimobilisasi dari berbagai cara, sehingga tidak mengandalkan pemerintah saja, tapi swasta juga dapat ikut membangun kota. Akan tetapi pihak swasta tidak boleh mendominasi.

Konreg. Nanti dievaluasi apakah yang telah diprogramkan BPIW di dalam Konreg bisa dipenuhi semua atau tidak. Kalau tidak, tahun depan diprogramkan lagi oleh Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur BPIW. Mekanisme internal BPIW sudah mantap, dan itu bahkan dicontoh Bappenas dan Kementerian Koordinator PMK, dan kedepan BPIW akan menjadi dapur nya Bappenas dalam menyusun *masterplan* kota.

Hen/Dina/Dian

Bagaimana koordinasi antar satminkal terkait masalah perkotaan?

Kalau antar satminkal tidak jadi persoalan, karena kita sudah punya

untuk penyusunan *masterplannya*. Ada beberapa pertimbangan kenapa kota-kota itu dipilih untuk dikembangkan. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan nasionalnya memilih Bitung sebagai pelabuhan internasional, karena punya potensi sebagai pintu masuk dari timur Indonesia. Jadi itulah yang menjadi prioritas, jadi kita tidak memperdebatkan lagi mengapa Bappenas memilih kota itu, karena kota-kota itu punya potensi untuk dikembangkan.

Mengapa BPIW harus menyusun program pembangunan kota?

Kalau sektor lain tidak membangun kota sebenarnya, mereka tidak *concern* kesana. Misalnya kalau sektor perhubungan, *concern* pada pembangunan pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api saja, bukan pada pembangunan kota. Jadi Kementerian PUPR harus *leading*

membangun kota melalui program yang disusun BPIW.

Apa yang perlu dipercepat di dalam mengatasi masalah perkotaan?

Kalau di Bappenas sudah jelas, semua kota yang ada di RPJMN sebanyak 135 kota itu harus dipercepat terpenuhi standar pelayanan perkotaannya. Tapi standar pelayanan perkotaan seperti apa itu belum dirumuskan secara jelas, karena standarnya banyak. Dari Kemendagri dan Kementerian Lingkungan Hidup juga memiliki standarisasi pelayanan

perkotaan sendiri. Dari sektor PUPR, Kita melakukan empat hal yang tadi terlebih dulu. Jadi BPIW itu tidak untuk semua sektor, BPIW infrastruktur *planning* untuk bidang PUPR.

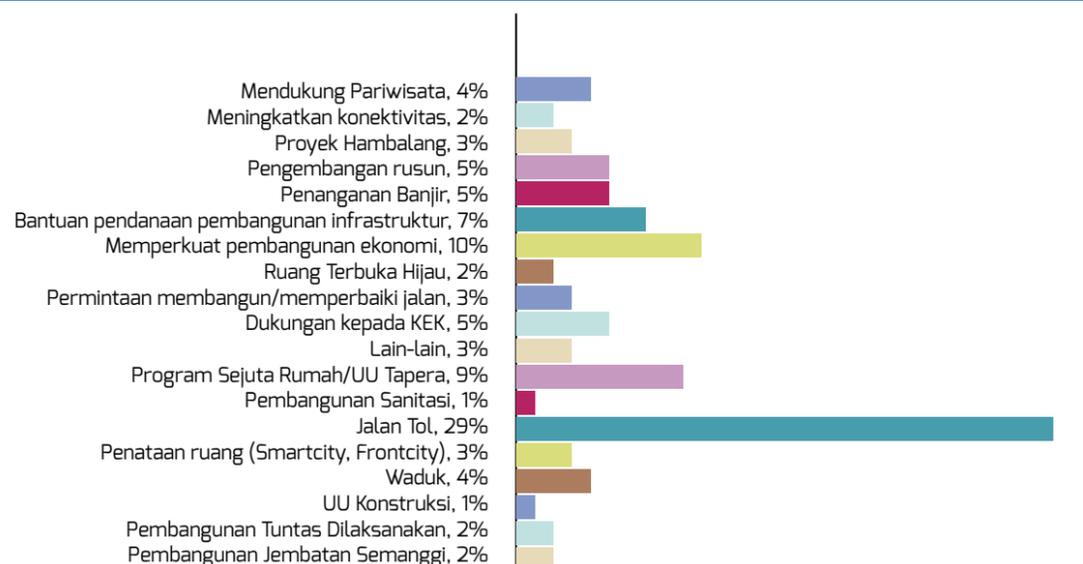
Membangun kota membutuhkan waktu yang panjang, bagaimana

Sektor lain tidak terlalu *concern* untuk membangun kota, jadi Kementerian PUPR harus *leading* untuk membangun kota



Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengannya. Guntingan berita kami sarikan dari 7 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Koran SINDO, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan, selama bulan Maret 2016. Total ada 399 berita dari 7 media koran periode 1 Maret – 31 Maret 2016.



Beberapa Contoh Berita Menarik Tentang Infrastruktur PUPR

Berita Menarik:

- **(Koran Investor Daily, Halaman 6; Jumat 4 Maret 2016)**
Progres Tol Palembang-Indralaya Capai 11%
Progres pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya sepanjang 22 kilometer hingga kini telah mencapai 11,26%. Capaian tersebut melebihi target sebesar 1,2% yang ditetapkan per 18 Februari 2016.
- **(Koran Bisnis Indonesia, Halaman 8; Jumat 4 Maret 2016)**
Berita Foto: Uji Beban Jembatan Sejumlah kendaraan bersiap mengikuti uji beban yang dilakukan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Kementerian Pekerjaan Umum di Jembatan Merah Putih, Ambon, Maluku.
- **(Koran Republika, Halaman 13; Jumat 11 Maret 2016)**
ITDC Mulai Bangun Infrastruktur KEK Mandalika
PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengembang KEK Mandalika NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 102 miliar untuk mengembangkan kawasan tersebut.
- **(Koran Republika, Halaman 14; Senin 14 Maret 2016)**
IPO Terdongkrak Infrastruktur
PT Bursa Efek Indonesia menilai, percepatan pembangunan infrastruktur di dalam negeri dapat mendorong maraknya penawaran umum perdana saham (IPO) yang dilakukan perusahaan.
- **(Koran Media Indonesia, Halaman 25; Senin, 14 Maret 2016)**
Warga Amuk Proyek Bocimi
Warga Kampung Limusnunggal, Desa Ciherang, Bogor marah dan merusak alat berat milik pengembang yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemarin.
- **(Koran Kompas, Halaman 20; Sabtu 19 Maret 2016)**
Pembangunan Jalan Trans-Papua Terhenti
Pembangunan jalan Trans-Papua ditiga lokasi wilayah pegunungan tengah terhenti pasca penyerangan terhadap tujuh pekerja PT. Modern di Sinak, Kabupaten Puncak.
- **(Koran Kompas, Halaman 18; Senin 21 Maret 2016)**
Infrastruktur Masih Prioritas
Meski realisasi pendapatan negara berpotensi di bawah target, Kementerian Keuangan berusaha mengelola fiskal agar berbelanja infrastruktur tetap besar. Saat pertumbuhan ekonomi beresiko melambat, pembangunan infrastruktur menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
- **(Koran Tempo, Halaman 17; Rabu 23 Maret 2016)**
Jokowi Resmikan Jembatan Senilai Rp 1 Triliun
Jembatan Tayan, Pontianak, Kal Bar resmi digunakan. Jalan penghubung Provinsi Kal Bar dan Kal Teng sepanjang 1.650 meter itu dibangun dengan biaya mencapai Rp 1.028 triliun.
- **(Koran Tempo, Halaman 24; Rabu 23 Maret 2016)**
Dorong Pemerataan Pembangunan, Kemenhub Bangun Pelabuhan Dari Sumatera Hingga Kalimantan
Pembangunan fasilitas transportasi laut di seluruh Nusantara secara merata dapat meningkatkan akses ke berbagai wilayah serta meningkatkan roda perekonomian daerah dan masyarakat
- **(Koran Kompas, Halaman 20; Kamis, 31 Maret 2016)**
Sosialisasi Terpadu Kementerian PUPR untuk Kualitas dan Akselerasi Infrastruktur
Kementerian PUPR berupaya mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur Indonesia.



Pentingnya Peran BPIW, Dalam Memantapkan Program Infrastruktur

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menyelenggarakan hajatan besar Februari lalu, yakni Pra Konsultasi Regional atau biasa disebut Pra Konreg di empat kota besar di Indonesia, yakni Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar. Kegiatan yang diikuti seluruh *stakeholder* terkait PUPR baik pusat maupun daerah ini merupakan persiapan sebelum digelarnya Konreg terkait pembangunan infrastruktur sektor PUPR tahun anggaran 2017. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc punya peran penting dalam memantapkan program infrastruktur tahun 2017.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc berpendapat Konreg merupakan kesempatan yang sangat baik untuk bisa mendengarkan secara langsung masukan dari daerah, terutama mengenai prioritas pembangunan yang ada di daerah tersebut. Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc, pemerintah daerah sebagai penanggungjawab wilayah, tentunya dapat mensinergikan program pembangunan wilayahnya dengan pemerintah pusat. Taufik juga mengungkapkan bahwa Konreg kali ini

“Untuk pembangunan infrastruktur berbasis wilayah ini tentunya dikerjakan oleh BPIW, dan diharapkan juga sinergi dan sinkronisasi programnya menjadi lebih baik dan sekarang ini proses pembahasannya lebih detil,”

berbeda dari sebelumnya, karena program dan perencananya berbasis wilayah. Dengan mengedepankan program berbasis kewilayahan, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014-2015 ini berpendapat bahwa yang diharapkan dari pelaksanaan Konreg adalah program kegiatan yang lebih mengakomodasi kepentingan daerah, kepentingan wilayah, dan juga ketajaman dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Untuk pembangunan infrastruktur berbasis wilayah ini tentunya dikerjakan oleh BPIW, dan diharapkan juga sinergi dan sinkronisasi programnya menjadi lebih baik dan sekarang ini proses pembahasannya lebih detil,” ujar Taufik saat ditemui Sinergi di tempat kerjanya, 14 Maret lalu. Pernyataan salah satu pejabat yang dikenal *low profile* ini didasari pada kepentingan masyarakat yang ada dalam suatu kawasan yang membutuhkan pelayanan yang optimal, baik pelayanan air, jalan, maupun prasarana perkotaan. “Sinkronisasi program harusnya dimulai dari suatu perencanaan kawasan. Sektor-sektor yang akan dikembangkan tentunya sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing kawasan. Kemudian dari situ bisa dipertimbangkan program-program Kementerian PUPR yang bisa digunakan untuk mendukung kawasan tersebut,” ungkap Taufik.

Tidak hanya melakukan sinkronisasi dan keterpaduan di sektor PUPR semata, hasil Konreg Kementerian PUPR ini juga dapat dikoordinasikan dengan kementerian lain seperti pariwisata, pertanian, dan perhubungan. “Sehingga mereka juga bisa menyesuaikan atau bisa memberi masukan lebih lanjut atas program-program kita. Jadi

instrumennya adalah instrumen koordinasi, tentunya ini juga dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai kementerian yang bertanggungjawab keseluruhan pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Hasil dari Pra Konreg akan menjadi acuan untuk digunakan pada

penyusunan program pembangunan tahun berikutnya. Oleh karenanya Taufik optimis proses pelaksanaan Konreg akan semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu, Taufik berharap dengan adanya BPIW, maka proses perencanaan dan program bisa berlangsung secara terus-menerus dan semakin tajam.

“Tentunya dengan adanya BPIW, maka Kementerian PUPR akan semakin bisa memberikan dukungan perencanaan terpadu dan sinkronisasi program dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Selain itu anggaran yang digunakan bisa semakin efisien dan efektif,” tukas Taufik.

Naufal/ Hendra/ Dian



Harmonisasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dibutuhkan dalam Pembangunan Daerah di Indonesia



Kepala BPIW, Hermanto Dardak saat Talkshow di MNC News Chanel

Sumber: Dok BPIW

Pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan berpedoman pada penataan ruang. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor. Sehingga diharapkan lebih mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan

memberi dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antar sektor serta antar kota dan desa, atau antar lingkungan atau kawasan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak, saat menjadi narasumber dalam talkshow Indonesia Bicara yang mengangkat tema "Membangun Daerah Bagi Indonesia" di MNC Channel, Jakarta (28/4).

Dalam diskusi tersebut, Dardak menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah



Kepala BPIW dan Masudi Syuhud membahas Pembangunan Daerah Bagi Indonesia

Sumber: Dok BPIW

lebih aktif dalam mengembangkan wilayah melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Dikatakannya, dalam WPS tersebut terdapat dukungan-dukungan berupa pembangunan infrastruktur ke beberapa kawasan seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang digagas oleh Kementerian Pariwisata, Kawasan Industri (KI) oleh Kementerian Perindustrian dan kawasan-kawasan lainnya. Kementerian PUPR melalui BPIW memberikan dukungan

"Kementerian PUPR juga membantu dalam dukungan pendanaan dan juga technical assistant," tutur Dardak.

Perlu adanya manajemen yang baik antara pembangunan jalan dari Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian antara pembangunan jalan dan penggunaan lahan dapat harmoni dan sesuai fungsinya. Rencana Tata Ruang juga perlu untuk didetailkan kembali menjadi peraturan zonasi sehingga dapat memperjelas peraturan yang sesuai dengan penggunaan lahannya.

Terkait dengan pembangunan yang bersinergi dengan kondisi daerah, Kementerian PUPR memiliki pedoman terkait pembangunan bahu jalan, trotoar, drainase dan daerah bebas jalan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. "Kementerian PUPR mensinergikan antara tata kota dengan pembangunan infrastrukturnya," lanjut Dardak.

Dardak juga mengatakan bahwa ke depan, perlu adanya manajemen yang

baik antara pembangunan jalan dari Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian antara pembangunan jalan dan penggunaan lahan dapat harmoni dan sesuai fungsinya. Selain itu, Rencana Tata Ruang juga perlu untuk didetailkan kembali menjadi peraturan zonasi sehingga dapat memperjelas peraturan yang sesuai dengan penggunaan lahannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan pondasi pertumbuhan yang dapat memberikan dukungan yang bermanfaat. **Naufal/infoBPIW**

Bahas Pengembangan Danau Toba, BPIW Lakukan Rapat Koordinasi dengan World Bank dan Instansi Lainnya di Medan



BPIW bersama World Bank melakukan koordinasi dengan Bappenas Provinsi Medan

Sumber: Dok BPIW

Kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara menjadi satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas yang akan dikembangkan pemerintah. Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi dengan World Bank, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dan kementerian terkait lainnya, di Medan

Rabu (2/3).

Dalam paparannya, Kabid Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Poppy M. Hutagalung menjelaskan bahwa kawasan Danau Toba merupakan terbesar di Indonesia, karena meliputi 8 kabupaten dan 64 kecamatan, dengan total luas kawasan (perairan dan daratan) mencapai 656.261 Ha. Selain berpotensi dalam bidang pariwisata, Danau Toba juga dapat dikembangkan menjadi

lumbung pangan dan areal perkebunan. Namun diakuinya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah permasalahan akses

menuju kawasan wisata tersebut. Bila menggunakan kendaraan pribadi dari bandara Kualanamu menuju Danau Toba membutuhkan waktu 4-5 jam.

Selain permasalahan akses darat, masalah angkutan udara juga menjadi kendala serius. Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kantor Menko Maritim dan Sumber Daya, Ridwan Djamiludin menjelaskan pada tahun 1991 wisatawan yang berkunjung ke



BPIW dan World Bank melakukan koordinasi dengan Bupati Kabupaten Samosir.

Sumber: Dok. BPIW

Danau Toba mencapai 500 ribu wisatawan, namun dikarenakan lemahnya manajemen transportasi udara jumlah wisatawan turun drastis menjadi 200 ribu wisatawan.

Untuk mengatasi hal itu menurutnya Presiden meminta dilakukan percepatan pembangunan bandara Sibisa dan Silangit. "Garuda juga sudah ditugaskan untuk menambahkan rute Jakarta-Silangit yang akan beroperasi 3 kali dalam seminggu guna mencapai target 1,5 juta wisatawan tahun 2024," tambah Ridwan.

Terkait pembangunan infrastruktur menurut

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi BPIW, Harris H. Batubara, dukungan Kementerian PUPR dalam hal pengembangan jalan tol Tebing Tinggi-Siantar, Siantar-

Parapat, dan Parapat-Sibolga sepanjang 175 km. Kemudian dilakukan pelebaran jalan kolektor primer di ruas Pematang Siantar-Merek, Tomok-Pangururan, Ajibata-Dermaga Ajibata, rehabilitasi serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. Selain itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan normalisasi saluran Tanah Ponggol, serta Penataan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM.

Perwakilan dari World Bank, George menjelaskan bahwa

World Bank memiliki misi besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, sehingga perlu dilakukan koordinasi bersama dengan pemerintah dalam mewujudkannya.

Kawasan Danau Toba terbesar di Indonesia, karena meliputi 8 kabupaten dan 64 kecamatan, dengan total luas kawasan (perairan dan daratan) mencapai 656.261 Ha. Selain berpotensi dalam bidang pariwisata, Danau Toba juga dapat dikembangkan menjadi lumbung pangan dan areal perkebunan.

Dalam rapat yang digelar di kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara tersebut juga disampaikan tiga poin penting hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo. Pertama, mengenai perintah untuk segera mengimplementasikan hasil rapat yang telah beberapa kali digelar.

Kedua, pembentukan Badan Otorita Danau Toba yang telah disetujui semua pihak dan direncanakan akan selesai pada 31 Maret mendatang. Ketiga, mengenai percepatan, terutama dalam pengembangan infrastruktur di kawasan tersebut. (andina/infobpiw)

Kementerian PUPR Siapkan Program Pendukung Percepatan 10 KSPN



Kepala BPIW, saat mengikuti rapat terkait pengembangan pariwisata

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung percepatan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak, saat rapat pembahasan kelembagaan pembangunan destinasi pariwisata, di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (23/3).

Lebih lanjut Dardak menjelaskan salah satu KSPN yang mendapat dukungan Kementerian PUPR yakni kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara. "Kami mempercepat pembangunan wisata di kawasan Danau Toba dengan membuat jalan tol, sehingga yang tadinya dari Danau Toba ke Medan memakan waktu 5 jam, maka dengan adanya percepatan pembangunan jalan tol, maka 1,5 jam sudah sampai ke sana. Pembangunan jalan tol sampai Tebing

Tinggi, kita tambah hingga Parapat, sehingga dengan hanya menempuh perjalanan sekitar 130 kilometer, dalam waktu 1,5 jam sudah sampai ke Danau Toba," ungkap Dardak.

Tidak hanya mendukung menuju destinasi wisata, Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Danau Toba. Beberapa

Sumber: Dok. BPIW

diantaranya membuat jalan lingkaran luar yang menghubungkan Parapat ke Balige hingga Sibolga. "Dengan pembangunan jalan, maka ada jalan akses menuju Samosir. Jalan lingkaran luar dan yang di Samosir kita jadikan jalan nasional. Kita prioritaskan akses menuju pusat-pusat wisata tadi dapat kompetitif," tegas Dardak.

Dalam kesempatan itu Dardak juga menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur di 10 KSPN juga mendapat

dukungan dari World Bank. Untuk merealisasikan dukungannya dan melihat kondisi kawasan wisata, World Bank yang didampingi BPIW telah melakukan tinjauan lapangan ke Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

Untuk mendukung pengembangan 10 KSPN ini menurut Dardak ada empat

kerajinan khas kawasan wisata tersebut. Keempat, kelembagaan daerah wisata. "Komponen kelembagaan ini penting untuk memajukan obyek wisata," tuturnya.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan yang juga Plh. Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ir. Wismana Adi Suryabrata, M.I.A., menambahkan dibuatnya kelembagaan ini dimaksudkan untuk keseluruhan destinasi

dan Menko Perekonomian yang menjabat sebagai ketua dari lembaga pengelola destinasi pariwisata itu. "Pertimbangannya kementerian yang dikelola adalah kementerian dibawahnya. Kemudian untuk Steering Committee atau SC ini, Ketua Pelaksana Hariannya kita usulkan Menteri Pariwisata karena pariwisata merupakan tugas pokoknya," ujar Wismana.



Suasana rapat koordinasi BPIW dengan Bappenas serta kementerian terkait

Sumber: Dok. BPIW

komponen yang utama yang harus pariwisata, sehingga nantinya dukungan dilakukan. Pertama, membuat pengembangan yang diperlukan, dapat

masterplan dengan basis pengembangan wilayah. Masterplan tersebut dibuat oleh Kementerian PUPR. Kedua, pembangunan infrastruktur, baik menuju destinasi maupun di dalam destinasi wisata tersebut. Ketiga, peningkatan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada obyek wisata dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjual

"Dengan pembangunan jalan, maka ada jalan akses menuju Samosir. Jalan lingkaran luar dan yang di Samosir kita jadikan jalan nasional. Kita prioritaskan akses menuju pusat-pusat wisata tadi dapat kompetitif," tegas Dardak.

diidentifikasi antar kementerian terkait setiap tahun. Wismana juga mengatakan, Bappenas mengusulkan Menko Maritim

Fungsi SC ini menurutnya memutuskan mengenai beberapa hal mengenai pengembangan SDM, infrastruktur, persiapan pembentukan kelembagaan, dan terkait pendanaan 10 KSPN tersebut.

Rapat ini juga dihadiri beberapa pejabat seperti Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Leonardo .VH. Tampubolon, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim, Ridwan Djamiluddin, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman. **Hen/infobpiw**

BPIW Paparkan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia pada Kegiatan *Infrastructure Week*



Foto bersama Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR dengan seminar Keynotes speech

Sumber: Dok. BPIW

Kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak memaparkan rencana percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya terkait infrastruktur didepan para investor pasar modal dalam acara *Market Outlook 2016*, di Jakarta, Selasa (23/2). Acara yang diselenggarakan tiap tahun oleh Panin Asset Management ini bertujuan untuk memberikan edukasi, ulasan dan prediksi keadaan pasar tahun berjalan, kepada para pelaku pasar modal tersebut.

Dalam acara ini Hermanto menjelaskan terkait tantangan pembangunan

infrastruktur Indonesia. Dikatakannya, saat ini Indonesia dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Disaat yang sama pula infrastruktur dipacu untuk memiliki daya saing. Tantangan lain menurut Dardak adalah terkait disparitas antar wilayah, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). "Kita melihat Pulau Jawa

dan Sumatera masih menjadi yang terdepan, dalam arti hanya dengan luas lahan 30%, namun ekonominya mencapai lebih dari 80% dan infrastrukturnya relatif lebih baik dibanding kawasan di luar Jawa dan Sumatera, yang luasnya sekitar 70% dari lahan nasional kita," ujar Dardak. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan di



Suasana Seminar Deloitte Infrastructure Week di Jakarta

Sumber: Dok BPIW

KTI tersebut.

Tantangan lainnya adalah di bidang pariwisata, dimana Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menetapkan 10 prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi fokus pembangunan bidang pariwisata dalam 5 tahun ke depan. Dengan menetapkan 10 prioritas KSPN ini akan dibangun infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur menurutnya dibangun terpadu untuk menghasilkan *outcome* dan *impact*, agar bisa memacu pertumbuhan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. "Ini menekankan kepada kita, bagaimana infrastruktur yang belum selesai, kita tuntaskan," tegas Dardak.

Urbanisasi juga menjadi tantangan yang di hadapi saat ini. Dalam empat dekade terakhir jumlah penduduk di perkotaan meningkat enam kali lipat. Jika pembangunan infrastruktur tidak bisa

tumbuh lebih cepat dibandingkan tingkat pertumbuhan maka kemacetan akan terjadi di wilayah tersebut. Sehubungan dengan itu menurut Dardak tahun ini, Kementerian PUPR akan meningkatkan kapasitas infrastruktur secara nasional baik jalan,

"Ini menekankan kepada kita, bagaimana infrastruktur yang belum selesai, kita tuntaskan," tegas Dardak.

waduk, pemukiman maupun perumahan. Hal ini difokuskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan.

Dalam era kompetitif ini menurut Dardak pemerintah dituntut untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan itu. Agar pembangunan bisa berjalan dengan baik, pemerintah juga perlu dukungan dari sektor

bisnis. "Kita terus mengupayakan agar infrastruktur dipacu untuk bisa menarik investor," tambah Dardak.

Saat ini menurutnya kawasan Pasifik merupakan pusat perekonomian dengan prospek pertumbuhan tertinggi. Hal tersebut baginya merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan siklus global yang masuk ke Indonesia.

Market Outlook merupakan acara yang secara rutin di gelar oleh Panin Asset Management yang merupakan sebuah perusahaan pengelola reksa dana di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1997 dan saat ini mengelola 15 reksa dana aktif. Melihat program pemerintah beberapa tahun kedepan sangat fokus untuk pembangunan infrastruktur sehingga Panin Asset Management berencana untuk berinvestasi pada sektor infrastruktur melalui penerbitan danareksa. **Andina/infoBPIW**

BPIW Lakukan Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Terkait Tunjangan Kinerja



Kepala Biro Kepegawaian Kementerian PUPR, Luthfiel Annam Achmad saat memberikan paparan

Sumber: Dok BPIW

Saat ini peraturan mengenai tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR. Peraturan tersebut telah diundangkan pada 11 Februari 2016 yang lalu. Untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai

peraturan yang baru ini dilakukan Sosialisasi Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), di Jakarta (8/3). Sosialisasi ini dihadiri para pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pemberian tunjangan kinerja tersebut.

Saat memberi kata sambutan mewakili Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana, Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala BPIW, Ety



Suasana sosialisasi peraturan Menteri PUPR terkait tunjangan kinerja

Sumber: Dok BPIW

Winarni mengatakan kenaikan tunjangan Kinerja Kementerian (PUPR) menjadi 70%, harus diiringi dengan kinerja yang lebih baik lagi. Pasalnya tunjangan kinerja merupakan bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas kinerja dan disiplin yang baik.

Kepala Biro Kepegawaian Kementerian PUPR, Luthfiel Annam Achmad saat memberikan paparannya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja diberikan kepada tiga golongan pegawai, yaitu pegawai yang bekerja di Kementerian PUPR, pegawai yang ditugaskan mengikuti diklat termasuk tugas belajar, dan pegawai dari daerah atau kementerian lain yang dipekerjakan atau diperbantukan di Kementerian PUPR, berdasarkan Surat Keputusan dari instansi asal pegawai tersebut.

Luthfiel juga menyatakan pemberian tunjangan kinerja didasarkan pada dua

unsur, yaitu penilaian prestasi kerja dan penilaian jumlah kehadiran. Oleh karena itu, setiap pegawai diwajibkan disiplin dalam hal kehadiran, dan membuat Sasaran Kinerja setiap tahunnya. Dijelaskannya juga bahwa

Pemberian tunjangan kinerja didasarkan pada dua unsur, yaitu penilaian prestasi kerja dan penilaian jumlah kehadiran. Oleh karena itu, setiap pegawai diwajibkan disiplin dalam hal kehadiran, dan membuat Sasaran Kinerja setiap tahunnya.

apabila seorang pegawai tidak masuk kerja, maka ada tiga kategori absen, yaitu izin, cuti, dan tanpa keterangan. "Setiap pegawai yang tidak masuk wajib mengajukan izin atau menyampaikan surat keterangan kepada atasan masing-masing," tegasnya.

Besaran tunjangan kinerja berbeda-beda

sesuai dengan kelas jabatan pegawai yang bersangkutan. Jabatan sangat menentukan besaran tunjangan bagi pegawai. Dengan kondisi tersebut menurut Luthfiel bagi seorang pegawai yang tidak memiliki jabatan struktural diharuskan mengambil jabatan fungsional baik fungsional umum atau fungsional tertentu. Pengaturan besaran tunjangan kinerja di Kementerian PUPR ini diatur dalam Keputusan Menteri PUPR No. 41/KPTS/M/2016.

Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat menutup acara ini menyatakan tunjangan kinerja wajib dipotong apabila kinerja dan tingkat disiplin pegawai kurang baik. Potongan tersebut perlu diberikan, agar azas keadilan dapat dirasakan oleh setiap pegawai. Selain itu, Dadang juga mengusulkan perlunya dibuat instrumen untuk mendukung proses penilaian kinerja dan penghitungan tunjangan kinerja agar lebih memudahkan dalam pelaksanaannya.

Mtr/infobpiw

Tol Pejagan – Pemalang Akan Dibuka Sebelum Idul Fitri



Kepala BPIW, Hermanto Dardak meninjau Tol Pejagan-Pemalang

Sumber: Dok BPIW

Pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang yang sudah mencapai 95 persen, diharapkan pada Mei 2016 atau sebelum Idul Fitri sudah dapat dibuka untuk umum. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hermanto Dardak saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi keynote speech pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tegal, Rabu (30/3).

Menurutnya, dengan dibuka akses jalan

tol ini akan memudahkan perjalanan para pemudik menjelang lebaran. Pembangunan Jalan tol sepanjang 20 kilometer yang merupakan Seksi II ini dilakukan mulai dari Pejagan hingga Brebes Timur. Sementara untuk seksi I (Pejagan-Brebes Barat) pembangunannya sudah 100 persen.

Setelah menyempatkan diri meninjau langsung ke lapangan di sela-sela acara Musrenbang, Dardak memastikan dengan dibukanya jalan tol ini, maka akses menuju Kota Slawi sebagai ibukota Kabupaten Tegal maupun akses menuju Kota Tegal akan lebih cepat. "Untuk itu, kedua daerah tersebut

diharapkan dapat memanfaatkannya agar wilayahnya semakin berkembang," katanya.

Saat melakukan peninjauan Kepala BPIW didampingi beberapa jajaran pimpinan dari BPIW, dan didampingi pimpinan dan staf Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V.

Pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 57,5 kilometer, akan melewati Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Pemalang. Jalan tol ini merupakan bagian Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan ujung barat Jawa di Merak Banten hingga Banyuwangi Jawa Timur.

Dardak menyampaikan, saat ini sedang



Suasana Mesrenbang Kabupaten Tegal 2016

Sumber: Dok BPIW

dilakukan pengerjaan gerbang tol dan dengan terbuka akses jalan tol ini, ekonomi Kabupaten Tegal maupun Kota Tegal diharapkan tumbuh lebih cepat seperti halnya Kota Cirebon. "Nantinya daerah tersebut harus dikembangkan, terutama kawasan industri dan pariwisata, karena aksesnya kini lebih mudah," tutur Dardak.

Ia juga menyatakan bahwa yang perlu juga dicermati saat menjelang lebaran adalah arus kendaraan dari Brebes Timur yang masuk ke Kota Tegal. Dengan arus kendaraan yang besar, maka diperlukan manajemen lalu lintas yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut. "Paling tidak, arus kendaraan nantinya bisa melewati ruas jalan nasional tapi juga bisa melalui jalan alternatif yang ada disitu," katanya.

Dalam kesempatan itu Dardak menyampaikan bahwa proses Musrenbang sangat penting untuk membuat langkah strategis terutama terkait pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal. Karena dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019 menyebutkan bahwa fokus pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan 35 wilayah pertumbuhan.

"Dalam 5 tahun, kita fokus pada wilayah pertumbuhan itu, yang didalamnya ada

suatu kawasan yang potensial untuk dikembangkan," katanya.

Bupati Tegal Enthus Susmono menyambut baik program PUPR yang

"Pembangunan infrastruktur di daerah Panggul menuju Prigi diprioritaskan di tahun 2017 mengingat daerah tersebut memiliki potensi yang besar terutama untuk kawasan pantai. Sehingga harus ada akses yang baik dari selatan ke utara. Koordinasikan dengan Perhutani dalam hal pembebasan lahan," tutur Dardak.

memadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah tersebut. Menurutnya, dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat membantu Kabupaten

Tegal, karena anggaran pembangunan daerahnya masih terbatas. Enthus pun optimis daerahnya akan lebih maju bila mendapat dukungan semua pihak, termasuk dari Kementerian PUPR.

Acara Musrenbang tersebut diisi dengan penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Haron Bagas Prakosa. Pada kesempatan itu Haron menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal mencapai 70 persen.

Dengan banyaknya pembangunan, maka angka pengangguran dapat ditekan hingga mencapai 6,04 persen. Sementara tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal terendah di Jawa Tengah yakni hanya mencapai 9,78 persen.

Musrenbang ini juga diisi beberapa kata sambutan dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kasubbid SDA dan Pertanian, Hasanaturodiyah, Ketua DPRD Kabupaten Tegal A.Firdaus A Syairozi, dan dari Anggota DPR RI Dapil 9, Agung Widyantoro, serta penyampaian beberapa masukan dari Anggota DPR RI Dapil 9 lainnya. **Hen/infobpiw**

Langkah Strategis Persatuan Insinyur Indonesia dalam Menghadapi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia



Foto bersama pengurus PII dengan B.J. Habibie

Sumber: Dok BPIW

Saat ini Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sadar akan pentingnya pendidikan tinggi teknik dalam kompetisi global berbasis iptek. Tantangan utama yang kini dihadapi Indonesia setelah resmi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah kurangnya jumlah insinyur Indonesia di tengah pemerintah sedang mencanangkan pembangunan infrastruktur yang masif.

Hal tersebut disampaikan oleh Hermanto Dardak selaku Kepala Badan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (BPIW) sekaligus Ketua Umum PII pada acara pelantikan Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia (YPTI) oleh Ketua Pembina YPTI, B.J. Habibie dan pelantikan rektor Institut Teknologi Indonesia (ITI) di Jakarta, Rabu (2/3).

Lebih lanjut Dardak dalam sambutannya mengatakan bahwa tantangan PII dalam menghadapi MEA dapat diatasi dengan beberapa langkah strategis yaitu setiap produk keinsinyuran harus memiliki undang-



B.J. Habibie memberikan arahan kepada anggota PII

Sumber: Dok. BPIW

undang dengan melalui beberapa tahap yang salah satunya adalah melalui register, dalam hal ini PII bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan sesuai dengan UU Keinsinyuran, seorang insinyur harus mementingkan keselamatan dan keamanan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan, dengan tujuan membuat Indonesia maju dan mandiri.

Saat ini, menurut Dardak, pengembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia sedang menjadi prioritas, untuk itu dengan pendekatan wilayah di dalam masing-masing wilayah terdapat kawasan strategis. Dalam hal ini, PII mengambil langkah untuk bekerjasama dengan salah satu wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei untuk mensinergikan dan membangun infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis tersebut sebagai engine of growth.

"Kedepan PII akan mendukung pembangunan infrastruktur dengan konsep triple helix, dimana akademik/lembaga riset, bisnis dan pemerintah akan saling

bersinergi," tutur Dardak. Dalam hal ini, harapannya peran perguruan tinggi seperti ITI akan semakin maju dalam mendidik calon insinyur dan mendapat umpan balik dalam

"Seorang insinyur harus senantiasa disiplin dalam bidang keinsinyuran karena tanggung jawab seorang insinyur merupakan tanggung jawab yang besar dalam pembangunan, oleh karena itu seorang insinyur harus senantiasa memiliki sifat keinsinyuran, yaitu high quality, low cost and on schedule" pesan Habibie.

keperluan pengembangan dari industri serta mengembangkan solusinya.

Dardak juga berharap, PII saat ini masih

senantiasa mengharapkan bimbingan dari B.J. Habibie dan senior lainnya dalam mengembangkan ilmu, sama-sama melangkah dan menyongsong sumber daya insinyur yang berkualitas.

Di akhir acara, Habibie berpesan kepada insinyur-insinyur Indonesia bahwa insinyur harus selalu berada di garis depan untuk selalu menterjemahkan kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan sesuai dengan kemampuan dan waktu yang dimiliki. Beliau juga mengutip salah satu ucapan dari wartawan Belanda yang mengatakan bahwa seorang maestro tidak jatuh dari langit, dia adalah hasil perjuangan dari masyarakat di sekitarnya.

"Seorang insinyur harus senantiasa disiplin dalam bidang keinsinyuran karena tanggung jawab seorang insinyur merupakan tanggung jawab yang besar dalam pembangunan, oleh karena itu seorang insinyur harus senantiasa memiliki sifat keinsinyuran, yaitu high quality, low cost and on schedule," pesan Habibie. **(naufal/infoppiw)**

Menteri PUPR dan Dubes Perancis Bahas Pengembangan *Eco District*

Eco-district atau *eco-distrik* adalah istilah dari kata “distrik” dan “eco” yaitu singkatan dari ekologi. *Eco-distrik* mengarah sebagai suatu perencanaan perkotaan dengan tujuan untuk mengintegrasikan goals “pembangunan berkelanjutan” dalam meminimalkan dampak ekologis proyek. Penekanan konsep ini terdapat pada pertimbangan masalah lingkungan secara total melalui cara menyelaraskan tingkat kemungkinan proyek dapat tercapai.



Menteri PUPR beserta jajaran membahas Pengembangan *Eco District* dengan pemerintah Prancis

Sumber: Dok. BPIW

Saat ini, Pemerintah terus mengupayakan pengembangan pariwisata Danau Toba, salah satunya dengan menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menko Maritim, Rizal Ramli memimpin rapat koordinasi dengan beberapa kementerian, seperti, Menko Polhukam, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR), Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Corinne BREUZE, yang juga membawa delegasi dari *French Ministry of Environment, Energy, and Maritime Affairs (MEDDE)* dan *French Environment and Energy Management Affairs (ADEME)* di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (8/3). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Basuki didampingi oleh pejabat Eselon I

Kementerian PUPR yakni Sekretaris Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) beserta jajaran, Kepala Badan Litbang, Dirjen Sumber Daya Air dan Direktur Jenderal Cipta Karya.

Duta Besar Perancis Corinne BREUZE mengatakan negaranya mendukung terhadap rencana pengembangan kawasan *Eco District* dan juga berniat untuk melakukan

ADEME sebagai badan energi dan lingkungan di Perancis siap untuk membantu pengembangan kota-kota di Indonesia dalam 4 bidang kerjasama, yaitu dalam hal pengembangan metodologi untuk urban project, hal-hal yang bersifat teknis, pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) dalam project leader, pertukaran pakar di bidang masing-masing dan peningkatan

Housing and Rehabilitation Program atau Kota Berkelanjutan, Perumahan Sosial dan Program Rehabilitasi.” lanjut Corrine.

Menurut Menteri Basuki, pengembangan *Eco District*, harus melihat karakter dari kawasan yang akan dikembangkan. “Kita bisa mengadaptasi konsep dari *green city* namun tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang terdapat di daerah tersebut,” tutur Basuki.



Foto bersama, pejabat kementerian PUPR bersama perwakilan pemerintah & kedubes Perancis

Sumber: Dok. BPIW

kerjasama dengan Indonesia.

Corrine berharap adanya percepatan atas dua inisiatif yang sedang berjalan dengan Indonesia yaitu penyiapan MoU sebagai peningkatan status kerjasama (*institutional cooperation*) dan percepatan implementasi fisik perwujudan *Eco District* di 7 kota (*technical cooperation*). Percepatan atas dua inisiatif tersebut memiliki tujuan sebagai pertukaran para pakar dalam menangani pembangunan yang berkelanjutan dan suatu upaya peningkatan kualitas hidup kota-kota di Indonesia, sekaligus sebagai respon terhadap tantangan perubahan iklim.

Lebih lanjut Corrine menjelaskan,

kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup. “Terkait pengembangan *Eco District* ini

Corrine berharap adanya percepatan atas dua inisiatif yang sedang berjalan dengan Indonesia yaitu penyiapan MoU sebagai peningkatan status kerjasama (*institutional cooperation*) dan percepatan implementasi fisik perwujudan *Eco District* di 7 kota (*technical cooperation*).

akan dibahas pada Bulan Oktober di Lyon, Perancis mengenai *Sustainable City, Social*

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada inisiatif awal dalam bentuk penyusunan implementasi konsep *Eco District* pada tahun 2013. *Eco District* merupakan perencanaan perkotaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologis. Gagasan ini menekankan pada pertimbangan masalah lingkungan dengan mengakomodasi konsep Kota Hijau. Konsep tersebut sudah diterapkan di 7 kota di Indonesia, yaitu Kota Bandung, Mataram, Yogyakarta, Singkawang, Wonosobo, Semarang dan Metro Lampung. (Naufal/InfoBPIW)

Pengembangan Anjungan Cerdas di Indonesia Adaptasi Michino-Eki Milik Jepang



Foto bersama Keynotes Speeches Seminar Regional Development Road Side Station

Sumber: Dok. BPIW

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk menggenjot perekonomian Indonesia untuk menjadi salah satu dari negara yang paling kompetitif di Asia pada tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian PUPR berperan penting dalam membangun infrastruktur di Indonesia, mempersiapkan dan memastikan perencanaan pembangunan infrastruktur

untuk dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan salah satu fokus utama dari pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan pembangunan daerah di seluruh Indonesia.

Maka dari itu, seluruh kementerian wajib memberikan fasilitas untuk menjamin pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat daerah di Indonesia. Tiga hal utama



Kepala BPIW sedang memberikan paparan tentang konsep Anjungan Cerdas

Sumber: Dok BPIW

dalam menjamin untuk meningkatkan pembangunan adalah kebijakan, teknologi dan infrastruktur.

Berikut yang disampaikan oleh Arie Setiadi, selaku Kepala Balitbang PUPR dalam membuka acara Seminar on Regional Development: Road Side Station. "Pada kesempatan ini, kita dapat belajar banyak dari Jepang dalam pengembangan Road Side Station atau Michino-Eki. Kita dapat membandingkan dengan Road Side Station yang ada di Indonesia, atau bisa kita sebut dengan "Rest Area". Hal ini dapat menjadi referensi untuk membuat sistem adopsi "Michino-Eki" di Indonesia," tutur Arie Setiadi.

Arie Setiadi juga mengatakan bahwa pada tahun 2014, IRE, NILIM dan rekan-rekan sepakat untuk menandatangani kerjasama untuk tahap kedua dengan enam bidang kerjasama, yaitu: lalu lintas teknologi pengumpulan data, jalan dengan lingkungan yang ramah, keselamatan jalan, anjungan cerdas atau

Michino-Eki, terowongan dan struktur bawah tanah, serta aspal butonor gussaphalt.

Pada kesempatan yang sama, Hermanto Dardak selaku Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menjadi salah satu keynote speaker untuk membahas pembangunan anjungan cerdas di Bendungan Tugu, Trenggalek dan Jembrana, Bali.

Dengan menetapkan 10 prioritas KSPN ini akan dibangun infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan tersebut.

"Proyeksi percobaan anjungan cerdas akan dilakukan di dua daerah yaitu di Trenggalek dan Jembrana, Bali. Saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan dan memastikan lokasi yang tepat untuk pembangunan anjungan cerdas" terang Dardak pada seminar yang diadakan di Jakarta, Senin (29/2).

Dardak juga menjelaskan, pembangunan anjungan cerdas di Trenggalek akan

menggunakan Bendungan Tugu sebagai pusat daya tarik yang ditambah dengan pemandangan hutan dan pegunungan di sekitarnya dan akan ditambahkan wifi, informasi daerah, CCTV serta media untuk promosi produk lokal.

Pada tahun ini juga, Kementerian PUPR memiliki inkubasi dan inkubasi tersebut akan banyak belajar dari Michino-Eki. "Harapannya, dalam tiga tahun ke depan masyarakat sudah dapat menikmati anjungan cerdas dan meningkatkan pariwisata di wilayah Bendungan Tugu di Trenggalek dan Jembrana di Bali," tutup Dardak dalam paparannya. (ini/humasbpiw)

BPIW Sosialisasikan Pengisian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Secara Elektronik



Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana memberikan arahan saat sosialisasi pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak.

Sumber: Dok. BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan Pengisian dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak bagi pegawai di lingkungan BPIW, Selasa (15/3). Kegiatan yang juga melibatkan pegawai Ditjen Pajak ini diikuti beberapa pejabat eselon 3, 4, dan staf di lingkungan BPIW.

Saat memberikan arahan, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menyatakan

kegiatan ini untuk menindaklanjuti edaran dari Ditjen Pajak yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak khususnya wajib pajak pribadi, diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan melalui e-filing secara online, paling lambat 31 Maret 2016. Menurut Dadang dipandang perlu menghadirkan tim dari Ditjen Pajak, agar dapat memberikan bimbingan dan pedoman bagi pegawai BPIW, terutama

cara mengisi e-filing secara online, karena sebelumnya pengisian SPT masih manual.

"Momen ini sangat bagus untuk membina diri kita agar lebih patuh membayar pajak. Ini bagian dari tugas kita sebagai Aparatur Sipil Negara. saya meyakini sistem yang baru ini sangat menguntungkan bagi kita wajib pajak, karena memudahkan dalam mengisi SPT dan tanpa biaya serta kita dapat merekam sendiri surat pemberitahuan dengan perhitungan sendiri, sehingga lebih akurat dan efisien," tutur Dadang.

Selain itu Dadang juga berharap kegiatan ini juga mampu mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran negara. "Ini juga melatih kita untuk mendukung revolusi mental, dan bagian dari tanggung jawab kita, untuk turut memajukan bangsa melalui kepatuhan dalam membayar pajak," tegas Dadang.

Diharapkan kepada seluruh pegawai untuk segera menyerahkan SPT sebelum tanggal 31 Maret tersebut. Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan dan penjelasan pengisian SPT, baik secara manual maupun online yakni melalui e-filing. **Shv/infobpiw**



Peserta sosialisas SPT Pajak Tahunan

Sumber: Dok. BPIW

BPIW Koordinasikan Pengembangan Kota Baru Maja

Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten akan dijadikan kota baru. Kota baru Maja ini merupakan satu dari 10 kota baru publik yang ditetapkan sebagai kota mandiri dan terpadu. Terkait hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bogor, dan perwakilan dari Bappeda Kabupaten Lebak, Tbk, serta satminkal terkait, di Gedung BPIW Kementerian PUPR, Kamis (10/3).

Dalam rapat ini juga dibahas mengenai rencana Memorandum of Understanding atau MoU antara Kementerian PUPR dan pemangku kepentingan terkait pengembangan 10 kota baru tersebut. Langkah yang dilakukan ini merupakan

pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 mengenai pengembangan kota baru yang diharapkan dapat mendukung program sejuta rumah.

Saat memimpin rapat itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hermanto Dardak mengatakan bahwa nantinya proyek ini memadukan jalan eksisting dengan jalan yang sama sekali belum ada. Tujuannya untuk membuka akses menuju kota baru tersebut. Diharapkan nantinya ada perpaduan jalan nasional dengan jalur kereta api, agar terdapat alternatif transportasi bagi masyarakat.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Kuswardono menambahkan persiapan Maja sebagai kota baru sudah cukup matang. Terbukti, dengan telah disiapkannya masterplan kota baru tersebut. Sebelumnya

juga telah dilakukan tinjauan ke lapangan. "Masterplan sudah disusun dari beberapa waktu lalu, dan kita berkolaborasi dengan Cipta Karya," ujar Kuswardono

Dalam paparannya, Kepala Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Dirjen Bina Marga, Triono Junoasmono mengatakan direncanakan akan dibangun jalan yang menghubungkan jalan Tol Jakarta-Serpong dengan Kota Baru Maja.

Rapat ini juga membagi tugas dari masing-masing kegiatan seperti terkait pembebasan lahan, pelebaran jalan, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Hal ini dilakukan agar proyek ini terlaksana dengan baik. Masing-masing pihak juga sepakat mendukung serta memberikan kontribusi nyata demi terlaksananya pengembangan kota baru tersebut. **Nin/infobpiw**



Suasana rapat pembahasan kota baru Maja

Sumber: Dok. BPIW

Sinkronisasi Program Pembangunan Desa Antar Kementerian dan Lembaga



Suasana rapat koordinasi & sinkronisasi Program Pengembangan Desa

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dan sinkronisasi program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan tahun 2016 antar Kementerian dan Lembaga (K/L) dan penetapan kawasan perdesaan yang menjadi prioritas nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali

mengadakan rapat koordinasi pemberdayaan kawasan perdesaan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bertempat di Ruang rapat Gedung Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Jakarta (15/3).

Sasaran diadakannya rakor adalah untuk mendapatkan calon lokasi yang akan direkomendasikan sebagai kawasan

perdesaan prioritas nasional; koordinasi dan sinkronisasi program K/L dan rencana tindak lanjut khususnya dalam sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tsb adalah dengan pengembangan kawasan-kawasan yang memiliki potensi ekonomi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri telah menetapkan lokasi kawasan perdesaan

mengadakan kegiatan pra konreg untuk mengklarifikasi pekerjaan di tahun 2017 yang sudah kita susun kepada teman-teman satminkal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan” ujar Kuswardono selaku Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan saat membuka rapat tersebut.

Lebih lanjut Kuswardono menjelaskan bahwa 35 WPS yang telah ditetapkan oleh Menteri PUPR itu mengacu kepada pengembangan wilayah strategis yang mendukung pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah. Sedangkan daerah yang tidak

termasuk kedalam 35 WPS tersebut akan dikembangkan melalui pendekatan antar WPS, sehingga tidak ada daerah yang luput dari pembangunan melalui pendekatan 35 WPS tersebut.

Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Awal Subandar menyampaikan bahwa hasil Multilateral Meeting yang diadakan pada tanggal 24 Februari 2016 lalu menghasilkan 7 program prioritas dalam rangka pemberdayaan kawasan perdesaan yaitu; pemenuhan standar pelayanan minimum di desa, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis,

konsisten dan berkelanjutan, penguatan pemerintah desa, serta pembangunan SDM, Keberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa dengan tujuan berkurangnya 5.000 desa tertinggal dan bertambahnya paling sedikit 2.000 desa mandiri yang turut melibatkan 30 Kementerian/Lembaga yang salah satunya

adalah Kementerian PUPR.

Kendala yang saat ini masih dihadapi dalam menjalankan 7 program prioritas pemberdayaan kawasan perdesaan ini yaitu masih belum seragamnya konsep kawasan di masing-masing Kementerian/Lembaga. “yang

masih menjadi kendala saat ini adalah konsep kawasan yang belum seragam di antara Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil sandingan kawasan yang di tentukan oleh Bappenas dan Kementerian Desa, saat ini sudah ditemui 18 kawasan prioritas yang telah disepakati” tambahnya.

Sementara itu masukan dari satminkal lain yang terkait yaitu diperlukannya komitmen pemerintah dan payung hukum yang kuat dalam menentukan batasan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran diadakannya rapat koordinasi adalah untuk mendapatkan calon lokasi yang akan direkomendasikan sebagai kawasan perdesaan prioritas nasional; koordinasi dan sinkronisasi program K/L dan rencana tindak lanjut khususnya dalam sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Sumber: Dok BPIW

yang termasuk kedalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) serta telah menyusun rencana pembangunan di tahun 2017 sesuai dengan hasil Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang telah dilaksanakan pada bulan Februari yang lalu.

“Tahun 2016 ini, ada mekanisme penting, sudah disusun BPIW, bulan lalu kami sudah

Upaya Mewujudkan *Smart City* di Indonesia



Green city merupakan awal terwujudnya smart city

Sumber: Dok BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong terwujudnya pengembangan kota-kota di Indonesia yang berkualitas dari seluruh aspek. Dengan mengemban tanggung jawab itulah, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengembangkan suatu program untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi kota yang disebut *smart city* atau kota cerdas.



Smart city yang dimaksud disini adalah kota yang dapat mengetahui potensi kota di dalamnya, memahami permasalahan tersebut lebih jauh, dan melakukan aksi terhadap permasalahan tersebut. Tujuan dari adanya *smart city* adalah untuk membentuk suatu kota yang aman, nyaman bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa tujuan *smart city* adalah untuk membentuk kota yang *sustainable* atau berkelanjutan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Saat ini, sebanyak 112 kota di Indonesia dibina menjadi *green city* atau kota hijau, kemudian dipilih delapan kota ditransformasi menjadi *smart city* melalui konsep EcoDistrict. Kedelapan kota yang diprioritaskan menjadi *smart city* dan mulai disusun rencana pengembangan kota meliputi Bandung, Metro, Yogyakarta, Semarang, Singkawang, Mataram, Jombang, dan Wonosobo.

Kedelapan kota yang dipilih tadi berdasarkan besaran kota, dimana ada yang mewakili kota metropolitan, besar, sedang dan kota kecil. Strategi ini dilakukan agar dapat mewakili seluruh skala perkotaan di Indonesia dan berbagai wilayah di Indonesia, sehingga program *green city* menjadi *smart city* ini juga dirasakan daerah lain di luar Pulau Jawa.

Dari sisi pengertiannya, *green city* adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan sehingga kota menjadi

tempat yang layak huni tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga generasi yang akan datang.

"Dalam program *green city* menjadi *smart city*, didalamnya ada delapan komponen utama, yang bila diterapkan di kota kita, maka dapat menjadi kota yang *smart*. Dibuat parameter penilaian kota agar memberikan stimulus dan penghargaan bagi kota-kota yang berupaya menerapkan program *smart city*. Program ini merupakan kelanjutan dari program *green city* yang telah dicanangkan PUPR sejak tahun 2012," ujar Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana, beberapa waktu yang lalu.

Kedelapan kota yang diprioritaskan menjadi *smart city* dan mulai disusun rencana pengembangan kota meliputi Bandung, Metro, Yogyakarta, Semarang, Singkawang, Mataram, Jombang, dan Wonosobo.

Kedelapan komponen *green city* yang pertama adalah *smart community* atau masyarakat yang cerdas. Pada komponen pertama ini, merupakan modal sosial bagi pengembangan kawasan perkotaan. Dalam rangka perwujudan efisiensi terkait sumber daya ini dapat diwujudkan dengan penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan seperti mengembangkan *knowledge society*, pemanfaatan aplikasi online untuk komunitas kota, pemasangan sensor di ruang publik, serta menjalin *networking* dengan kota-kota sejenis.

Untuk pengembangan ini dibutuhkan juga iklim pemerintahan yang produktif dan efisien dan mendukung perwujudan komunitas yang inovatif.

Komponen kedua, *smart planning and design* atau perencanaan dan disain yang cerdas, dimana perencanaan terpadu antara infrastruktur dan pengembangan kawasan yang menggunakan seluruh pengetahuan dan teknologi terkini untuk mewujudkan lingkungan

yang produktif dan efisien. Salah satu contoh dari perwujudan dari perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu secara cerdas untuk pengembangan wilayah dan kawasan ini seperti yang terjadi di Sumatera Bagian Selatan, dimana pembangunan jalan tol juga disediakan jalan untuk kereta api dan box utilitas yang dibangun di kanan dan kiri jalan tol tersebut.

Selanjutnya komponen ketiga, smart transportation atau transportasi yang cerdas. Dengan menerapkan konsep teknologi terkini, sehingga kota tersebut memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan efektif dalam membantu pergerakan manusia dan barang di kota tersebut. Perwujudan dari prinsip transportasi cerdas ini misalnya transit oriented development (TOD), jaringan intermoda yang saling terhubung dengan pusat kegiatan dalam suatu kawasan, efisiensi dalam penggunaan lahan, konstruksi, dampak lingkungan serta biaya dalam pembangunan sistem transportasi. Selain itu pada sisi jalan juga dapat disediakan pedestrian atau trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk menikmati alam sekitarnya.

Komponen keempat, yakni menerapkan smart water management

atau manajemen air yang cerdas. Dengan diterapkannya komponen ini bertujuan agar penggunaan air baku dan airu bersih dapat dikelola lebih efisien. Contohnya, bagaimana mengupayakan agar air hujan tidak mengalir ke sungai dan ke laut, tapi diserap dalam tanah, sehingga bisa digunakan untuk berbagai kepentingan dan air dapat disimpan sebagai

cadangan bila musim kemarau tiba. Air yang mengalir dari setiap rumah tangga dapat dioleh sehingga dapat digunakan kembali, seperti untuk menyiram tanaman, sehingga penggunaan air dapat lebih efisien. Dengan manajemen air yang cerdas ini, maka dapat dilakukan pengendalian banjir dan konservasi air di Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini juga berdampak pada penataan transportasi air dan dermaga, pengembangan pariwisata, kawasan perniagaan, dan pelabuhan.

Kelima, penerapan konsep smart waste management atau manajemen pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dengan cerdas bukan hanya sekedar memilah sampah, namun bisa juga dengan mengubah sampah menjadi energi, sehingga ada nilai ekonomi yang bisa membantu masyarakat kota.

Keenam, adalah penerapan smart green building atau bangunan ramah lingkungan. Penerapan dari komponen tersebut berupa

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa tujuan smart city adalah untuk membentuk kota yang sustainable atau berkelanjutan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.



Konsep penghijauan dalam tata kota metropolitan

Sumber: Dok BPiW

perencanaan pembangunan, pegerasian hingga dalam pemeliharaan mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi penggunaan sumber daya alam dan energi serta memperhatikan kualitas kenyamanan ruang bagi pemakainya. Konsep ini telah diterapkan terhadap dua gedung yang ada di lingkungan Kementerian PUPR.

Komponen yang ketujuh adalah, smart green open space atau ruang terbuka hijau yang cerdas. Beberapa kota di Indonesia sudah menerapkannya, dimana RTH bukan sebagai kaawasan resapan air dan ruang interaksi masyarakat namun juga menjadi ruang yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi secara luas melalui jaringan internet maupun videotron serta memberikan edukasi bagi masyarakat.

Kedelapan, komponen smart energy. Konsumsi energi di perkotaan relatif lebih besar dibandingkan dengan wilayah non perkotaan, karena memiliki aktivitas yang lebih banyak. Pencapaian smart energy ini dapat dapat dicapai dengan mengaplikasikan konsep smart grid, yaitu mengintegrasikan aksi-aksi atau kegiatan dari semua pengguna, mulai dari pembangkit sampai ke konsumen dengan tujuan agar efisien, berkelanjutan, ekonomis dan suplai listrik yang aman. Selain itu efisiensi penggunaan energi dapat dicapai dengan mengaplikasikan konsep pencahayaan yang cerdas pada area publik, pengembangan lahan sawit/kemiri sunan sebagai bahan energi hijau baru di perkotaan, serta pengembangan infrastruktur sumber daya air mendukung energi hijau melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Tiga Kota Mulai Terapkan Smart City

Program smart city kini tidak lagi sebatas konsep semata. Setidaknya ada tiga kota di Indonesia yang mulai menerapkan program smart city. Ketiga kota tersebut adalah Bekasi, Kota Gorontalo, dan Magelang. Berikut uraian mengenai tiga kota tersebut dalam menerapkan program Kota Pintar tersebut.

1. Kota Bekasi Luncurkan Patriot Operation Centre Smart City

Pemerintah Kota Bekasi belum lama ini meluncurkan Patriot Operation Centre (POC) Smart City. Langkah ini merupakan upaya untuk mewujudkan Smart City, karena POC merupakan salah satu instrumen utama dari Bekasi smart city yang akan mengintegrasikan data tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ruang kontrol POC yang berada di kantor wali kota dapat digunakan untuk menonitor informasi dari seluruh SKPD serta memeriksa permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan POC ini masyarakat dapat mengaksesnya

selama 24 jam dan mendapat jaminan kepastian hukum terhadap proses akuntabilitas dan transparansi dari pelayanan publik yang ada di kota tersebut. Lewat sistem tersebut titik-titik kemacetan dan lokasi penumpukan sampah dapat dipandu dengan mudah.

2. Kota Gorontalo Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Wujudkan Smart City

Untuk mewujudkan smart city, Kota Gorontalo melakukan inovasi berupa penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pengembangan konsep smart city berbasis TIK ini memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalam sistem pemerintahan. Inovasi TIK tidak saja mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, tapi juga membuat sistem kerja menjadi lebih efisien dan hemat biaya.

Selain itu, Pemerintah Kota Gorontalo juga telah membuat program yang disebut System Gorontalo Comment Center. Sistem ini merupakan wadah penampungan dari setiap permasalahan yang menyangkut kondisi Kota Gorontalo dapat segera dicari solusi dan penanganan dengan cepat. Penerapan smart city sejalan dengan visi

Kota Gorontalo yang mewujudkan kota yang S.M.A.R.T, yakni "Sejahtera, Maju, Aktif, Religius, dan Terdidik".

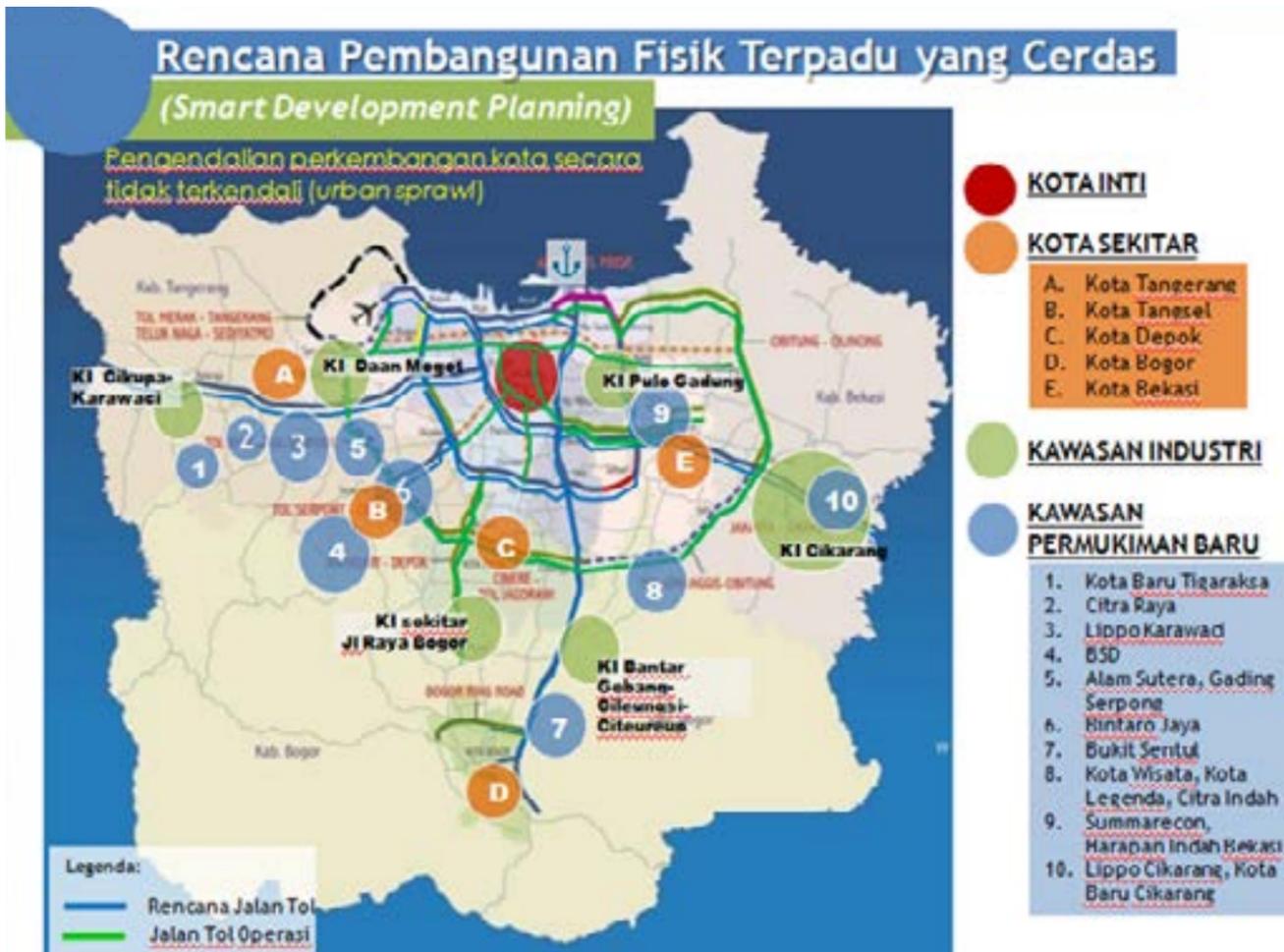
3. Kota Magelang Mengokohkan Diri Sebagai Smart City

Pemerintah Kota Magelang melakukan penataan kota untuk mewujudkan program smart city. Upaya yang

dilakukan kota ini adalah dengan menerapkan delapan atribut dalam konsep smart city. Delapan atribut itu nantinya menjadi indikator untuk melihat suksesnya implementasi smart city. Delapan indikator itu merupakan inovasi dari konsep green city yang sebelumnya pernah diterapkan pada 112 kota/kabupaten di Indonesia.

Delapan indikator dalam konsep smart city, antara lain smart development planning, smart green open space, smart transportation, smart waste management, smart water management, smart building dan smart energy. Kedelapan indikator ini untuk membuat tata kelola kota Magelang yang berkelanjutan. Dengan menerapkan delapan indikator ini, kini kota yang memiliki penduduk kurang dari 200 ribu jiwa ini mengokohkan diri sebagai salah satu smart city di Indonesia.

Tim redaksi



Mengupas Keberadaan Kawasan Metropolitan



Oleh : **Dr. Eko Budi Kurniawan, ST.M.Sc**
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW



Geliat kehidupan kawasan metropolitan

Sumber: Istimewa

Kata 'Metropolitan' diambil dari kata 'Metropolis' yang berasal dari bahasa Yunani, yakni 'Meter' berarti 'ibu', dan 'Polis' berarti 'Kota', sehingga 'Metropolis' dapat diartikan sebagai kota yang sangat besar atau kota besar yang dikelilingi kota-kota yang lebih kecil membentuk satu kesatuan kawasan perkotaan besar atau kawasan metropolitan. Pada perkembangannya, sebuah kawasan perkotaan dapat disebut sebagai kawasan metropolitan didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain yang sering digu-

nakan adalah dari ukuran jumlah penduduk dan dari segi tingkat perekonomiannya.

Di India dan Indonesia, misalkan, menggunakan ukuran 1 juta penduduk sebagai batas minimum untuk kawasan metropolitan. Namun di beberapa negara dengan jumlah penduduk yang relatif lebih rendah, ukuran besaran minimal jumlah penduduk metropolitan pun lebih sedikit. Di Canada, sebagai contoh, kawasan metropolitan didefinisikan antara lain memiliki jumlah penduduk paling sedikit 100 ribu, dengan 50% penduduk ting-

gal di kota inti. Tingkat perekonomian dapat juga diperhitungkan dalam mendefinisikan kawasan metropolitan. Kota-kota besar di Eropa, sebagai contoh, memiliki jumlah penduduk tidak sebanyak kota-kota besar di Asia pada umumnya. Namun produksi aktivitas perekonomian mereka tidak kalah besar atau bahkan lebih besar dari Asian counterparts mereka yang memiliki jumlah penduduk setara.

Pada umumnya, kota-kota metropolitan tidak secara spesifik direncanakan untuk

Sistem Transportasi Cerdas (Smart Transportasi)

Transit Oriented Development (TOD)

Contoh KBT untuk sabuk hijau perkotaan (sepeda, dan pedestrian)

Transportasi air dan kanal

menjadi kota metropolitan. Mereka tumbuh dari pusat desa atau kota kecil, berkembang menjadi kota besar, dan kemudian menjadi kota metropolitan atau bahkan megapolitan. Biasanya, kota-kota tersebut dibangun tidak jauh dari sungai atau laut, karena terkait dengan kebutuhan hidup masyarakat akan air, sebagai prasarana transportasi, dan terkait dengan fungsi pertahanan. Dapat dilihat pada Kota Roma, Paris, dan London, yang permukiman awalnya berada tepat di tepi sungai, atau kota-kota besar pelabuhan seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Antwerp. Dengan banyaknya orang yang bermukim dan lokasi yang strategis di tepi sungai dan pelabuhan, daerah tersebut berkembang menjadi pusat perdagangan dan juga pemerintahan.

Sebuah kota berkembang menjadi kota besar bisa juga karena melakukan kolonisasi terhadap bangsa atau wilayah lain, atau menjadi bagian dari proses kolonisasi. Kota Roma berkembang pesat melalui proses kolonisasi yang terbentang luas tidak hanya di Eropa namun juga di Kawasan Timur Tengah. Namun sebaliknya, kota-kota yang menjadi bagian dari koloni bangsa Roma, seperti Paris dan London, juga berkembang dengan pesat akibat pengaruh budaya dan pengetahuan yang dibawa oleh bangsa Romawi. Demikian juga kolonisasi di Afrika dan Asia, yang turut menumbuhkan kota-kota di wilayah tersebut.

Demikian juga dengan Indonesia. Pada

masa pra kolonial, kota-kota belum dikenal di Nusantara. Yang ada adalah pusat-pusat kerajaan. Ketika Belanda masuk ke Indonesia, beberapa daerah dikembangkan seperti Kota Batavia, Semarang, Surabaya dan Medan. Kota-kota tersebut, selain sebagai pusat pemerintahan, juga dikembangkan sebagai entrepot, yakni kota pelabuhan tempat mengiriskan hasil sumber daya alam untuk diproses di negara pusat koloni, dalam hal ini untuk Indonesia dikiriskan ke Belanda.

Perkembangan kota-kota juga dipengaruhi faktor perkembangan teknologi. Ketika teknologi perang dan transportasi masih terbatas, kota-kota tumbuh sebagai "kota benteng". Seiring dengan kemajuan teknologi, benteng menjadi tidak diperlukan karena tidak mampu menahan serangan senjata dengan daya hancur yang semakin besar. Demikian pula kemajuan teknologi transportasi membuat manusia dapat berpindah tempat lebih jauh dalam waktu yang lebih singkat, sehingga besaran aglomerasi perkotaan pun membesar, membentuk metropolitan atau mega-

politan. Jadi perkembangan sebuah kota dipengaruhi oleh faktor historik, baik terkait dengan politik, perang, perdagangan, maupun kemajuan teknologi.

Saat ini di Indonesia, tujuh kawasan metropolitan ditetapkan di dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) sebagai Kawasan Strategis Nasional Perkotaan (KSN

Perkotaan), yakni Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo), Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak-Cianjur), Cekungan Bandung, Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi), Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Sarbagita (Denpasar,

Badung, Gianyar, dan Tabanan), serta Mammiasata (Makasar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Selain itu, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 mengamanahkan perlunya pembangunan 5 kawasan metropolitan baru, yakni Palapa (Padang, Lubuk Alung, Pariaman), Palembang Raya, Banjarbakula (Banjarma-

sin, Banjarbaru, Barito Kuala, dan Tanah Laut), Mataram Raya, dan Bimindo (Bitung, Minahasa, dan Manado).

Secara struktur, kawasan-kawasan metropolitan tersebut terdiri dari kota inti dan kota-kota satelit mandiri. Gerbangkertosusila, misalkan memiliki kota inti Surabaya dengan Gresik, Sidoarjo, dll. sebagai kota/kawasan satelit mandiri. Hal ini disebabkan oleh membesarnya kawasan perkotaan sehingga melampaui wilayah administratif kota tersebut, membentuk kantong-kantong kawasan perkotaan yang tumbuh menjadi kota-kota satelit di sekeliling kota utama atau kota inti.

Kawasan-kawasan perkotaan tersebut juga mengalami permasalahan yang umumnya juga terjadi di berbagai kota-kota metropolitan lainnya di dunia, yakni antara lain kemacetan lalu-lintas, banjir, kurangnya air bersih, permasalahan persampahan dan sanitasi, kurangnya ruang terbuka hijau, tingginya tingkat polusi udara dan sungai, dan meningkatnya suhu udara. Cakupan pelayanan air bersih di Jabodetabek, sebagai contoh, masih belum optimal. Pada tahun 2010, coverage untuk DKI Jakarta baru mencapai 61,6%, di Kabupaten Bogor 22,3%, bahkan di Kota Tangerang hanya 7,6%.

Terdapat tiga jenis perencanaan kawasan metropolitan, yakni:

1. Perencanaan regional metropolitan,

yakni konektivitas antara kota inti dan kota-kota satelit mandiri termasuk juga pengembangan jalan lingkar dan angkutan komuter, efisiensi sumber daya melalui pembangunan infrastruktur skala metropolitan seperti TPA (Tempat Pembuangan Akhir) regional, pengembangan aktivitas-aktivitas utama di kota-kota satelit mandiri untuk mengurangi ketergantungan dari kota inti, penanganan banjir, dst.

2. Penataan kawasan perkotaan, antara lain melalui penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari total luas kawasan perkotaan, penyediaan jaringan jalan dengan rasio antara luas jalan dan luas kawasan perkotaan mencapai 15%-20%, efisiensi lahan kota melalui pembangunan vertikal (compact city), adaptasi iklim melalui penambahan jalur hijau, mewujudkan kota sehat melalui penyediaan jalur pejalan kaki dan pengguna sepeda, integrasi transportasi publik dengan pusat-pusat kegiatan dan permukiman (transit oriented development), dan aplikasi berbagai prinsip-prinsip smart growth lainnya.

3. Perencanaan kawasan prioritas, antara lain melalui revitalisasi kawasan, perbaikan infrastruktur, perbaikan kawasan permukiman dan pusat-pusat kegiatan perkotaan, perencanaan kawasan perkotaan baru pendukung struktur metropolitan, dsb.

Untuk mengembangkan kawasan met-

ropolitan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan (PPKP) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki beberapa program kerja. Bila tahun 2015, disusun Rencana Pengembangan (Development Plan) tujuh KSN Perkotaan yang diamanatkan di dalam RTRWN, maka pada tahun 2016 ini dilanjutkan dengan penyusunan feasibility study (FS) dan pra desain-nya. Selain itu, di tahun 2016 ini juga disusun rencana pengembangan kawasan metropolitan baru untuk Bimindo (Bitung-Minahasa-Manado) dan Palembang Raya, sesuai dengan amanat RPJMN.

Rencana pengembangan kawasan metropolitan disusun dengan menjadikan rencana tata ruang dan kebijakan-kebijakan sektor terkait sebagai payung. Dalam hal ini, perencanaan difokuskan pada penyediaan infrastruktur regional metropolitan, khususnya infrastruktur PUPR, yang selain untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, juga pusat-pusat kegiatan perkotaan (perdagangan, finansial) dan kawasan industri serta infrastruktur terkait lainnya seperti bandara dan pelabuhan. Mengacu pada Jane Jacobs dan berbagai scholar lainnya, kawasan perkotaan besar merupakan ujung tombak perekonomian sebuah negara. Beberapa bahkan diidentifikasi oleh Sassen sebagai kota global atau kota dunia (world city,

Penyediaan RTH Cerdas

(Smart Green Open Space)



Kebijakan 30% RTH

- Pengembangan Taman Tematik
- Sebaran RTH di berbagai tingkat (*city wide*, kecamatan, kelurahan)
- Peran RTH yang bervariasi (lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dll)



Penggunaan
Wifi



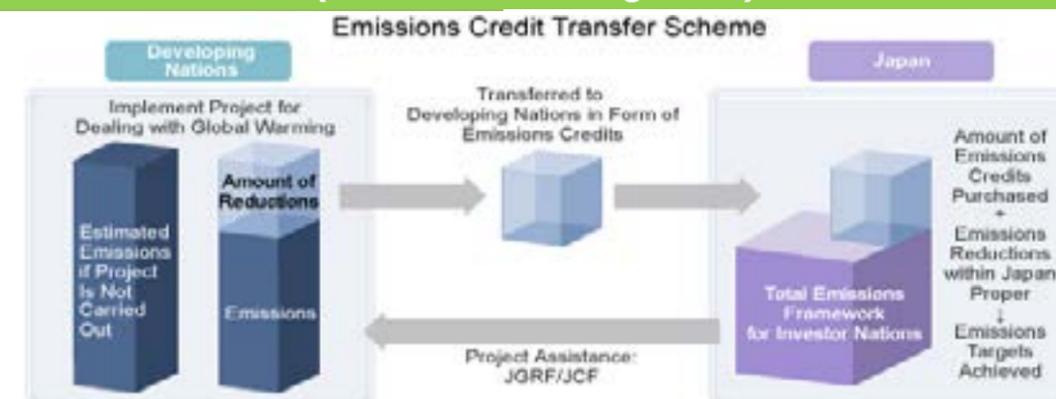
Sensor dan
CCTV
untuk
keamanan &
kenyamanan



Videotron

Pengelolaan Limbah secara Cerdas

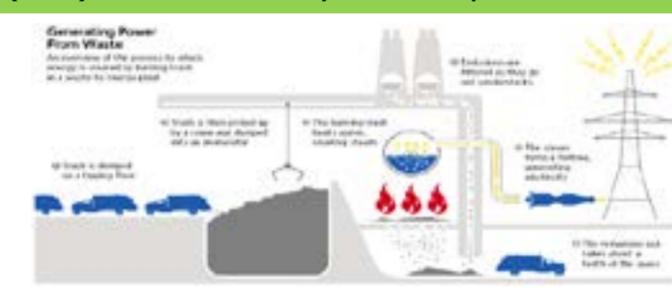
(Smart Waste Management)



Clean Development Mechanism (CDM) di Jakarta, Surabaya, dan Denpasar



3R (contoh: Bantar Gebang untuk waste to energy)



Friedmann). Dengan peran yang sedemikian besar, penyediaan infrastruktur yang terhambat akan mendegradasi kontribusi metropolitan terhadap perekonomian nasional.

Tidak hanya terkait dengan kontribusi ekonomi metropolitan yang signifikan, masalah keselamatan publik pun perlu mendapat perhatian dalam penyusunan rencana pengembangan metropolitan ini, misalkan penyelesaian masalah banjir. Di daerah yang tanpa penduduk, banjir bukanlah permasalahan yang signifikan. Namun untuk sebuah kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar, banjir menjadi permasalahan besar karena terkait dengan keamanan hidup. Untuk itu berbagai upaya perlu dilakukan, misalnya untuk banjir yang datang dari laut akibat land subsidence yang cukup cepat di Pantai Utara Jakarta, yang rata-rata mencapai 7,5-14 cm per tahun, tanggul laut raksasa multi fungsi dapat direncanakan, sehingga selain untuk perlindungan dari banjir juga dapat bermanfaat sebagai reservoir untuk air baku dan jalur transportasi.

Adapun penyusunan feasibility studies dan pra desain kawasan, difokuskan pada penataan kawasan perkotaan dan kawasan prioritas. Pengukuran *key performance indicator* (KPI) yang akan digunakan sebagai basis penataan kota seperti persentase ruang terbuka hijau, rasio luas jalan per luas kawasan perkotaan, persentase cadangan

air baku per kapita, dan persentase penurunan rumah tidak layak huni dilakukan di sini. Dengan menggunakan KPI, penataan kawasan perkotaan dapat dilakukan secara

penyusunan *feasibility studies* dan pra desain kawasan, difokuskan pada penataan kawasan perkotaan dan kawasan prioritas. Pengukuran *key performance indicator* (KPI) yang akan digunakan sebagai basis penataan kota.

terukur. Namun demikian, tentu saja faktor-faktor lain perlu diperhatikan. Ruang terbuka hijau sebagai contoh, pencapaian 30% saja tidaklah cukup, ketersebaran dan lokasi nya juga perlu mendapat perhatian karena RTH memiliki fungsi sosial yaitu sebagai tempat rekreasi, selain fungsi sebagai tempat resapan air, penyerap CO2 dan gas polutan lainnya, mengurangi efek urban heat island (UHI), meningkatkan kualitas udara dan air

sungai, penyerap 85% radiasi ultra violet yang merusak, serta menurunkan kualitas udara hingga 2-3 derajat celcius. Dengan ini diharapkan kota yang aman, nyaman, produktif, efisien dan berkelanjutan dapat terwujud.

Contoh lain misalnya rasio antara panjang jalan dibagi luas kawasan metropolitan diharapkan dapat mencapai 15-20%. Selama ini untuk Jakarta contohnya, hanya 6-7%, sementara kota-kota metropolitan lain di dunia seperti Tokyo dan New York diatas 15%. Meski kota-kota metropolitan itu memiliki public transportation yang baik, seperti kereta bawah tanah atau subway dan trem, namun mereka juga memiliki jaringan jalan yang cukup luas. Hal ini penting mengingat pengangkutan barang/logistik, angkutan dan pemadam kebakaran, misalnya, tidak diangkat oleh angkutan umum. Kemacetan yang mempengaruhi angkutan barang, contohnya, berpengaruh terhadap inflasi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan kawasan metropolitan menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini karena membangun kota tidak mudah, butuh waktu yang panjang dan perencanaan serta koordinasi implementasi yang baik.

Pesona Pantai Ria Kenjeran Surabaya



Pantai Ria Kenjeran terletak di kecamatan Kenjeran di timur Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kawasan ini berada sekitar 9 Km dari pusat kota, yang juga berdekatan dengan Jembatan Suramadu. Untuk mencapai tempat ini, bisa dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dengan menggunakan bus damri lalu turun di terminal Joyoboyo, kemudian melanjutkan dengan menaiki angkutan umum Lyn R (nama untuk angkot) ke arah Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran dibuka setiap hari selama 24 jam. Harga tiket masuk ke Pantai Ria Kenjeran cukup murah, yaitu Rp 15.000 per orang, serta Rp 8000 untuk parkir sepeda motor, dan Rp 10.000 untuk parkir mobil.

Salah satu tempat wisata favorit di Surabaya ini menyajikan berbagai macam fasilitas. Seperti area bermain Kya-kya Playground dan Waterpark yang semakin melengkapi area permainan disana. Namun yang berbeda sekaligus menarik dari Pantai ini adalah Stupa Maha Brahma atau patung Buddha empat wajah dan juga patung Dewi Kwan Im yang merupakan tempat peribadatan bagi umat Buddha sekaligus menjadi tempat wisata menarik bagi pengunjung lainnya.

Patung Raksasa Kwan Im

Bangunan klenteng pada dasarnya memiliki design yang khas. Demikian pula dengan klenteng Sanggar Agung yang mempunyai bentuk bangunan yang unik dan menakutkan. Terlebih bangunan tersebut memiliki ornamen-ornamen bernuansa Bali. Inilah yang menjadi daya tarik para pengunjung. Pengunjung tidak terbatas para jemaat yang ingin sembahyang saja tetapi juga masyarakat umum yang ingin melihat dari dekat ataupun berfoto di area klenteng.

Klenteng Sanggar Agung atau Klenteng Hong Tang Sang berdiri di atas laut, dan memiliki luas bangunan 4.000 meter persegi. Klenteng Sanggar Agung didirikan oleh keluarga Soetiadji Yudho dan diresmikan pada tahun 1999, bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Ia bermaksud membawa semangat spiritual umat Tridharma sekaligus harapan menampilkan sebuah ikon bagi Kota Surabaya. Patung raksasa Kwan Im dibangun dua tahun kemudian.

Yang cukup unik dari Klenteng ini adalah pintu masuk yang menyerupai bentuk pura tempat ibadah umat hindu. Kemudian pada sisi kanan bagian depan klenteng terdapat relief kayu yang mengisahkan Sang

kehidupannya. Pada bagian ruangan sanggar terdapat altar utama dengan patung Buddha berlatar belakang dinding dengan relief Buddha berwarna emas. Sedangkan pada bagian altar utama terdapat beberapa arca

Salah satu tempat wisata favorit di Surabaya ini menyajikan berbagai macam fasilitas. Seperti area bermain Kya-kya Playground dan Waterpark yang semakin melengkapi area permainan disana. Namun yang berbeda sekaligus menarik dari Pantai ini adalah Stupa Maha Brahma atau patung Buddha empat wajah dan juga patung Dewi Kwan Im yang merupakan tempat peribadatan bagi umat Buddha

Sang Buddha dan Dewa lainnya. Pada ruangan lain terdapat altar dengan ukuran lebih kecil dengan arca dewa. Pada halaman belakang terdapat sepasang patung naga dengan motif ukiran yang menghiasi pintunya.

Bagian belakang klenteng merupakan bagian yang paling indah, dimana terdapat patung Dewi Kwan Im Pouw Sat dan empat pelindungnya. Ada juga 2 patung naga di setiap sisi patung dewi Kwan Im dengan panjang masing-masing 6 meter. Sedangkan

Buddha Gautama sewaktu masih anak-anak beserta ibu kandungnya serta relief tentang

patung Kwan Im sendiri memiliki tinggi sekitar 20 meter dan tampak indah layaknya



Pantai Kenjeran saat surut menjelang malam

Sumber: BPIW

sebuah karya seni. Patung tersebut dikawal oleh dua penjaga Shan Nan dan Tong Nu serta empat Maharaja Langit pelindung empat penjuru dunia. Gerbang langit di bawah kaki patung Kwan Im itu dijaga oleh sepasang Naga. Sang Dewi Kwam Im sendiri ini sudah menjaga kelenteng tersebut sekitar 13 tahun lamanya

Klenteng Sanggar Agung kini menjadi sebuah obyek wisata di kawasan pantai Kenjeran di Surabaya. Keberadaan Sanggar Agung menjadi lebih menarik karena lokasi klenteng ini terletak tepi laut dan jika Anda berdiri di bawah gerbang raksasa dengan patung-patung yang indah dan artistik itu, kita bisa menyaksikan panorama indah Pantai Kenjeran dengan latar belakang Jembatan Suramadu di kejauhan

Stupa Maha Brahma

Indonesia memiliki empat patung Buddha tidur yang terkenal, yaitu di Maha Vihara Mojopahit di Mojokerto, Vihara Dhammadipa Arama di Malang, Pagoda Avalokitesvara Buddhagaya Watugong di Semarang, Vihara Buddha Dharma 8 Pho Sat di Bogor dan rupanya ada satu patung Buddha yang menarik di Surabaya, Jawa Timur tepatnya di Pantai Ria Kenjeran. Yaitu Stupa Maha Brahma atau yang biasa dikenal dengan nama patung Buddha 4 wajah yang diresmikan pada November 2004 yang lalu.

Untuk menemukan Patung Buddha ini sangat mudah sekali, karena bangunan patung yang tinggi dan berada dekat dengan Kelenteng Sanggar Agung. Yang menjadikan patung ini berbeda adalah patung Buddha tersebut memiliki 4 wajah dan 8 tangan yang mirip dengan patung Phra Phrom (Four Faced Buddha) di Kuil Erawan, Bangkok, Thailand yang membawa kita seakan-akan berada di Thailand.

Empat Wajah yang dimiliki patung Buddha ini merupakan sebuah lambang dari sifat kebaikan sang Buddha itu sendiri, yaitu melambangkan murah hati, pengasih, adil, dan meditasi. Sedangkan delapan tangan



Salah satu tempat favorit pantai Kenjeran

Sumber: Istimewa

yang dimiliki melambangkan kekuatan dari sang Buddha dan masing-masing tangan memegang benda-benda yang berbeda pula. Tangannya ada yang memegang tasbih, ada yang pegang tongkat kebesaran, juga cakram, ada juga yang membawa cupu berisi air suci, kitab suci, kerang, dan teratai serta salah satu tangan kanannya memegang dada.

Kompleks Patung Buddha 4 Wajah dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan bangunan berukuran 9x9 meter. Ukuran dari patung pun mengandung angka 9, seperti halnya panjang sisi alasnya dan tinggi dari patung Buddha.

Patung Buddha ini memiliki tinggi mencapai 36 meter jika digabungkan dengan tinggi sampai ke puncak kubahnya sehingga didaulat sebagai patung tertinggi di Indonesia oleh Museum Rekor

Indonesia dan juga dilapisi oleh emas yang membuatnya tetap berkilau di malam hari. Kompleks Patung Buddha 4 Wajah dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan bangunan berukuran 9x9 meter. Ukuran dari patung pun mengandung angka 9, seperti halnya panjang sisi alasnya dan tinggi dari patung Buddha. Angka 9 tersebut adalah sebuah angka tunggal yang tertinggi, sekaligus merupakan sebuah lambang kesempurnaan.

Di sekitar patung Buddha ini terdapat taman-taman yang dipenuhi dengan pepohonan rindang. Selain itu, disini juga ada patung gajah dan ruangan untuk meditasi di sekitar patung Buddha ini dan dapat digunakan untuk beribadah bagi yang memeluk agama Buddha.

Wisatawan yang berkunjung kesini bisa melihat patung ini dari jarak yang dekat. Pengunjung juga diperbolehkan untuk memotretnya atau jika ingin berpose dengan patung Buddha empat wajah ini sebagai latarnya. Suasana yang asri membuat patung ini menjadi destinasi wisata alternatif bagi mereka yang ingin merasakan angin pantai sambil menikmati suasana yang hening. **Dina**

Dukungan Kementerian PUPR Terhadap Pembangunan 15 Bandar Udara

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dukungan jaringan jalan nasional pada bandar udara Pengumpul Primer (PP), Pengumpul Sekunder (PS), dan Pengumpul Tersier (PT). Hal ini diatur dalam Permen PU No. 03/PRT/M/2012. Berikut ke-15 bandar udara baru tersebut yang dibagi berdasarkan pulau dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang ada di sekitar bandar udara tersebut :

1. Letung

Bandar Udara di Letung di Kabupaten Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk dukungan Kementerian PUPR dengan infrastruktur jalan sekitar bandar udara sehingga dapat diperlancar akses barang maupun akses orang dari dan ke Letung. Bandar udara tersebut memiliki lahan seluas 135 hektar.

2. Tambelan

Bandar Udara di Tambelan Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan bandar udara perintis. Kementerian PUPR juga memberi dukungan terutama terkait infrastruktur jalan menuju bandara. Melalui pendekatan WPS yang berkaitan dengan di Provinsi Kepulauan Riau yakni WPS 3 Batam-Tanjung Pinang, diharapkan pengembangan di wilayah tersebut semakin berdampak pada perekonomian masyarakat.

3. Kertajati di Majalengka

Bandar udara Kertajati di Majalengka Jawa Barat dipadukan dengan apa yang sebut kota baru berbasis *aerocity* atau kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas perkotaan yang saling mendukung dengan kegiatan bandar udara.

4. Kabir-Patar

Bandar udara ini berada di Bali-Nusa Tenggara. Bandar Kabir di Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor NTT. Dengan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, Kementerian PUPR mendukung pembangunan bandar udara tersebut.

5. Muara Teweh : Beringin

Bandar Udara Beringin adalah bandar udara yang terletak di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Tidak hanya mendukung infrastruktur jalan, Kementerian PUPR juga mendukung pengembangan kawasan sekitar bandar udara.

6. Tebelian : Susilo

Bandar udara tersebut berada di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Dengan WPS yang ada di sekitar daerah itu, Kementerian PUPR siap memberikan nilai tambah dengan program pembangunan infrastruktur.

7. Maratua

Bandar Udara Maratua yang terletak di lokasi wisata kepulauan terluar Indonesia, yakni Pulau Maratua, Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Guna melaksanakan amanat Nawa Cita, dimana membangun dari pinggiran, Kementerian PUPR mendukung dengan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah di kawasan tersebut.

8. Samarinda Baru : Temindung/Sungai Siring

Banda Udara yang berada di Kalimantan Timur yang direncanakan selesai dibangun tahun 2017, tentunya didukung Kementerian PUPR melalui pendekatan wilayah.

9. Buntu Kunik: Pontiku/Tana Toraja Baru

Bandar Udara Perintis Buntu Kunik di Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dapat dipercepat karena bandara ini sangat terkait dengan perencanaan pengembangan industri pariwisata di Sulsel, khususnya Tana Toraja. Kementerian PUPR mendukung dengan melengkapinya dengan penyediaan infrastruktur.

10. Morowali

Bandar Udara Morowali di Sulawesi Tengah mendapat dukungan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur sekitar bandar udara seperti kawasan industri. Infrastruktur bandara itu sangat menunjang kelancaran distribusi barang, orang dan jasa khususnya dari dan ke daerah Morowali. Kementerian PUPR juga akan membangun irigasi dan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

11. Miangas

Bandar Udara di Pulau terluar Miangas di Kabupaten Talaud (sekitar 250 mil arah Utara Kota Manado) Provinsi Sulawesi Utara akan rampung tahun ini. Kementerian PUPR mendukung dengan pembangunan infrastruktur dengan konsep WPS.

12. Siau : Sitaro

Pembangunan Bandar Udara Pihise di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) selesai dibangun tahun ini, bersamaan dengan bandara di pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. Pembangunan infrastruktur dengan konsep WPS dari Kementerian PUPR diharapkan dapat membantu pengembangan kawasan tersebut.

13. Namniwel: Namlea

Bandara Namniwel di Namlea, ibu kota Kabupaten Buru, Maluku, diprogramkan diperluas hingga memenuhi standar internasional. Membangun infrastruktur di kawasan timur Indonesia, salah satunya di Maluku menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian PUPR. Apalagi poin pentingnya adalah mensinkronkan dan memadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan.

14. Werur

Bandar Udara Werur ini berada Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Dengan dibangunnya bandar udara ini, Kementerian PUPR akan mendukung dengan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.

15. Koroway Batu

Koroway Batu di Kabupaten Boven Digoel Papua. Program utama Pulau Papua dalam mendukung peningkatan konektivitas dan mengurangi disparitas. Semua pembangunan infrastruktur harus dilakukan terkoneksi, terpadu, dan dilakukan sinkronisasi antar sektor baik pemerintah pusat dan daerah sehingga pengembangan wilayah dapat benar-benar diterapkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dukungan terhadap Pembangunan 15 Bandar Udara



Pulau	Bandar Udara
Sumatera	1. Letung 2. Tambelan
Jawa	3. Kerta Jati: Majalengka
Bali-Nusra	4. Kabir- Patar
Kalimantan	5. Muara Teweh: Beringin
	6. Tebelian: Susilo
	7. Maratua
	8. Samarinda Baru: Temindung/ Sungai Siring
Sulawesi	9. Buntu Kunik: Pontiku
	10. Morowali, Tana Toraja Baru
	11. Miangas
	12. Siau: Sitaro

Pulau	Bandar Udara
Maluku	13. Namniwel: Namlea
Papua	14. Werur
	15. Koroway Batu

- Dukungan jaringan jalan nasional: bandar udara Pengumpul Primer (PP), Pengumpul Sekunder (PS), dan Pengumpul Tersier (PT) (PermenPU No. 03/PRT/M/2012)
- Dari 15 bandar udara, hanya 3 bandar udara (Kertajati, Tebelian, Samarinda Baru) yang merupakan bandar udara pengumpul pada tahun 2020–2030 dan telah diakses oleh jaringan jalan nasional

Terdapat 20 bandar udara yang diusulkan Kementerian Perhubungan (Surat No. UM. 208/1/14PHB 2014):

- Terdapat 13 bandar udara yang beririsan dengan 15 bandar udara versi Trilateral Meeting (Bappenas), kecuali Namniwel dan Koroway Batu
- Hanya 5 bandar udara yang merupakan Bandar Udara Pengumpul (Primer/ Sekunder/ Tersier) s/d tahun 2020 kewenangan nasional.



Bandung Command Center, Langkah Menuju Smart City



Bandung Command Center

Sumber: infobdg.com

Bandung Command Center (BCC) adalah sebuah gagasan dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai salah satu upaya menjadikan Bandung sebagai kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. BCC bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik.

Sejak awal peluncurannya pada Januari 2015 lalu dan banyak memunculkan respon positif dari berbagai kalangan. Command Center adalah sebuah sistem dimana pengawasan kota cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi komputer, atau sebagai gambaran seperti yang terdapat di film-film Hollywood seperti Star Trek. Sementara untuk mengakses info kota, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet.

Bandung Command Center memiliki bentuk bangunan yang melengkung dengan dindingnya yang bertekstur unik, berbentuk kepingan segi 6, mirip motif yang tercetak pada sarang tawon. Layaknya pesawat canggih, terdapat panel dengan tiga layar monitor

dengan desain kursi-kursi yang bergaya futuristik.

Dalam Bandung Command Center tersebut terdapat banyak aplikasi yang bisa memonitor keadaan Bandung secara real time. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles location, video analisis dan sebagainya. Sebagai penunjang BCC, di 80 titik di Kota Bandung akan dipasang CCTV yang di dalamnya terdapat sistem IVA (Intelligent Video Analysis) untuk menginformasikan pelanggaran lalu lintas dan 50 kendaraan akan dipasang GPS. Rekaman-rekaman CCTV tersebut nantinya akan dianalisis lebih detil sehingga timbul notifikasi sesuai kebutuhan.

Fungsi dari Command Center sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan ke dalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. Untuk pelayanan publik, seluruh pelayanan publik di kota Bandung dapat diakses dengan mudah dengan teknologi yang canggih. Seperti mengurus KTP, mengecek perizinan, hingga memonitor kemacetan atau banjir bisa dilakukan pengawasan dan penyebaran informasi secara realtime. Bandung

Command Center ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Bandung Command Center menggunakan sistem *Intelligent Operation Center* (IOC) sebagai pusat informasi untuk Kota Bandung.

Sistem tersebut memungkinkan untuk mengakses ke seluruh data petugas pemerintah daerah dan aset pemerintah daerah. Sistem IOC ini juga dapat memudahkan operator dalam mengawasi kondisi kota. IOC secara otomatis akan melihat notifikasi secara otomatis apabila terjadi pelanggaran. Misalnya ada PKL (pedagang kaki lima) di daerah terlarang bisa ternotifikasi secara otomatis, hingga bisa diketahui oleh operator tanpa melototi terus CCTV. Jadi di layar ada tulisan berwarna merah 'Ada PKL'.

BCC terintegrasi dengan Laporan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang merupakan sebuah situs aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online. Terkait dengan data sosial media, BCC juga terintegrasi dengan

beberapa sosial media untuk mengetahui secara langsung pengaduan tindakan kejahatan atau informasi macet lalu lintas, dan jika ada tindakan kriminal atau hal-hal yang mencurigakan terjadi, masyarakat Kota Bandung dapat menekan tombol SOS

Fungsi dari Command Center adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan ke dalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. Untuk pelayanan publik, seluruh pelayanan publik di kota Bandung dapat diakses dengan mudah dengan teknologi yang canggih.

di aplikasi BCC yang langsung terintegrasi dengan kantor pusat BCC dan langsung

diterima oleh kepolisian setempat untuk segera diatasi masalah yang terjadi di tempat.

Terkait dengan infrastruktur, masyarakat Kota Bandung dapat melaporkan jalan-jalan yang rusak secara langsung melalui media sosial dan diteruskan langsung oleh BCC ke Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung untuk segera ditindaklanjuti.

Bandung Command Center adalah langkah Ridwan Kamil untuk mewujudkan smart city di kotanya. Fasilitas ini baru pertama kali ada di Indonesia dan dinargetkan command center akan ada di setiap kecamatan pada tahun ini. Harapannya, BCC dapat menjadi salah satu alat untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada warga, khususnya Bandung.

Sumber: <http://www.infobdg.com/v2/bandung-command-center-ruang-kontrol-ala-film-star-trek/>



Walikota Bandung Ridwan Kamil menjelaskan fungsi BCC

Sumber: infobdg.com

Dinamika Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan menjadi pilihan masyarakat di era modernisasi saat ini. Kota punya dinamikanya sendiri seiring padatnya masyarakat yang beraktifitas di kota. Banyaknya gedung-gedung pencakar langit, padatnya lalu lintas kota, dan kawasan kumuh, menjadi warna tersendiri dari sebuah kawasan perkotaan, seperti Jakarta dan sekitarnya.



Lalulintas padat di kota Jakarta



Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Bandung



Pembangunan di kawasan perkotaan



Kondisi bantaran kali Ciliwung sebelum direnovasi

KOTA & PERKOTAAN



KERANGKA SISTEM PERKOTAAN DALAM WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)



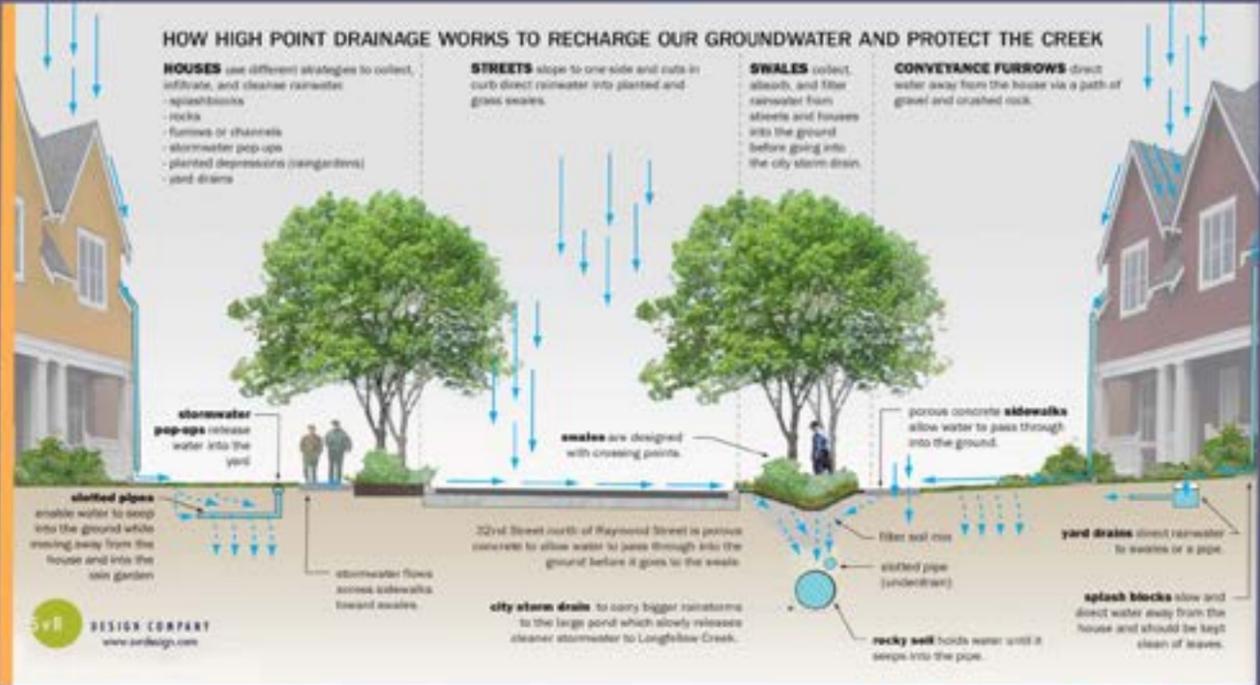
PERKOTAAN



URBAN FORM AND STRUCTURE KAWASAN PERKOTAAN



INDEKS DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KEBERLANJUTAN KAWASAN PERKOTAAN



Air Bersih HIJAU

MANFAATKAN AIR HUJAN SEBAGAI SUMBER AIR BAKU ATAU PUN AIR BERSIH, DENGAN MENERAPKAN PENDEKATAN YANG BERORIENTASI TAMPUNGAN (STORAGE-ORIENTED APPROACH)

Kumpulkan air hujan yang jatuh di atap-atap rumah ke dalam tampungan dan kemudian manfaatkan untuk keperluan rumah tangga sehingga mengurangi kebutuhan air bersih.

Tampung aliran limpasan kawasan pemukiman ke dalam kolam-kolam penampungan yang selanjutnya digunakan sebagai air baku.

Terapkan teknik-teknik atau bangunan-bangunan yang mampu menyerap air hujan ke dalam tanah untuk mengurangi aliran yang masuk ke sungai.

GREEN INFRASTRUCTURE

• Benefits and Practices •

	Green Roofs	Tree Planting	Bioretention & Infiltration	Permeable Pavement	Water Harvesting
Reduces Water Treatment Need	●	●	●	●	●
Improves Water Quality	●	●	●	●	●
Reduces Grey Infrastructure Needs	●	●	●	●	●
Reduces Flooding	●	●	●	●	●
Increases Available Water Supply	●	●	●	●	●
Increases Groundwater Recharge	●	●	●	●	●
Reduce Salt Use	●	●	●	●	●
Reduces Energy Use	●	●	●	●	●
Improves Air Quality	●	●	●	●	●
Reduces Atmospheric CO2	●	●	●	●	●
Reduces Urban Heat Island	●	●	●	●	●
Improves Aesthetics	●	●	●	●	●
Increases Recreational Opportunity	●	●	●	●	●
Reduces Noise Pollution	●	●	●	●	●
Improves Community Cohesion	●	●	●	●	●
Urban Agriculture	●	●	●	●	●
Improves Habitat	●	●	●	●	●
Cultivates Public Education Opportunities	●	●	●	●	●

JALAN HIJAU



1. Tree Canopy – Pohon lokal yang besar meningkatkan habitat, udara bersih, jalan, sidewalks dan pemukiman yang sejuk
2. Street Lighting – Lampu LED yang efisien, dapat dengan tenaga alternatif, dekat dengan jalan untuk keamanan
3. Walkability / Accessibility – jalur pejalan kaki yang lebar, aman dan nyaman
4. Bike Access – Jalur sepeda yang jelas dan aman serta terkoneksi
5. Stormwater – "Bioretention" gardens and treeboxes sebagai filter polutan dan menyerap air
6. Paving / Permeability – melambatkan laju kendaraan bermotor untuk keamanan pejalan kaki dan sepeda

"With The Nature" Green



Membangun Selaras Dengan Alam

- Impervious Cover
- Bioretensi
- Drainase Alamiah
- Ruang Terbuka
- Penghijauan (Buffer)
- Sumur Resapan
- Wetland
- dll



Membangun Dengan Merusak Alam

- Kontur diratakan
- Rawa diurug
- Tamanisasi
- Irigasi Pompa
- Saluran Kanal
- Kolam Detensi
- Sistem Pompa
- Sistem Pintu Air
- dll



Tips Hadapi Kemacetan

Bepergian dengan mobil pribadi mungkin menjadi salah satu pilihan transportasi bagi kebanyakan orang. Namun bagi orang yang tinggal di kota-kota besar terutama di kota Jakarta tentunya sudah terbiasa dan tidak kaget lagi ketika menemui masalah jalanan yang begitu macet.

Jalanan yang macet ditambah kondisi badan yang lelah sehabis bekerja, tentunya akan menambah tingkat stress Anda. Yang harus anda waspadai. Menurut The American Institute of Stress, stres dalam jangka panjang berakibat buruk bagi kesehatan jantung, reproduksi, dan pencernaan. Agar semua ini tak berbuntut anjang bagi anda, berikut kami berikan beberapa tips agar anda tetap relax ketika berkendara di tengah kemacetan.

1. Sediakan Cemilan

Menyetir dalam jangka waktu lama dapat menguras energi. Perut kosong bisa membuat emosi anda lebih gampang tersulut dan mendatangkan stres. Tentunya agak sulit untuk mencari tempat makan di saat terjebak

kemacetan. Cemilan juga bisa mengurangi rasa jenuh anda agar suasana hati lebih rileks. Karena itu, selalu siapkan snack di mobil anda. Pilihlah kacang-kacangan, terutama almond, sebagai camilan dalam perjalanan anda. Kandungan vitamin B2, vitamin E, magnesium dan zinc dalam almond berperan besar memperbaiki mood dan menghalau stres.

2. Redakan dengan Aroma

Penelitian dari University of Maryland Medical Center menemukan, aroma Peppermint atau lavender dapat mengurangi rasa lelah dan meredakan stres. Ada baiknya menaruh wewangian beraroma tersebut di mobil anda untuk mengurangi stres dikala macet.

3. Maksimalkan Perangkat Audio

Dengarkan lagu favorit anda untuk menurunkan ketegangan berlebihan selama mengemudi. Menurut Elizabeth Scott, M.S., pengarang 8 Keys to Stress Management, musik dapat memberikan kebahagiaan dan menjadi obat stres yang sangat ampuh. Anda bisa memanfaatkan radio mobil Anda, Selain terhibur Anda juga akan mendapatkan informasi yang berguna. Beberapa stasiun radio yang menyiarkan info tentang kemacetan di jalan akan sangat membantu Anda

sebagai panduan untuk memilih jalan alternatif yang bisa dilewati agar tidak lebih terjebak lagi dalam kemacetan yang lebih parah.

4. Rencanakan Rute Perjalanan

Dengan merencanakan rute perjalanan dan memperkirakan arus lalu lintas yang anda lalui, sedikit banyak anda telah menghemat waktu perjalanan anda. Jika memungkinkan gunakan pula perangkat navigasi (GPS) yang telah dilengkapi dengan data 'traffic report' yang memberitahukan lokasi-lokasi terjadinya kemacetan. Dengan demikian, pengendara dapat memperkirakan jalur mana yang perlu dihindari agar tidak terjebak macet.

5. Ciptakan suasana berkendara yang nyaman dan menyenangkan

Penting untuk tidak mudah terpancing oleh kondisi sekitar dan ulah pengendara lain yang mungkin membuat Anda emosi. Pastikan juga Anda menjaga situasi di dalam kendaraan agar tetap kondusif dan nyaman. Melakukan Stretching secara berkala saat macet juga dapat sangat membantu. Dengan stretching, selain dapat menghilangkan rasa pegal, juga dapat membantu melemaskan otot-otot tubuh.



